



LAPORAN KINERJA 2025

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKj ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND 4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyusunan LKj Tahun 2025.

Pencapaian akuntabilitas kinerja KPKNL Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal organisasi. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi upaya pencapaian tujuan organisasi, yang pada akhirnya berdampak pada pencapaian visi dan misi organisasi. Menyikapi hal tersebut, KPKNL Pekanbaru secara proaktif menempuh langkah-langkah strategis melalui penguatan mitigasi risiko, optimalisasi digitalisasi layanan, serta peningkatan intensitas koordinasi dengan para *stakeholder* untuk memastikan setiap tantangan dapat diatasi secara cepat dan tepat. Diharapkan penyusunan LKj ini dapat memberikan gambaran kinerja yang jelas, terukur, dan transparan, sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh KPKNL Pekanbaru. Sepanjang tahun 2025, komitmen tersebut membuahkan hasil nyata. KPKNL Pekanbaru berhasil melampaui target-target krusial, seperti meningkatkan PNBPN Piutang Negara secara signifikan melalui inovasi pemasaran lelang barang jaminan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang lebih luas, dan dicapainya penyelesaian sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah yang melebihi ekspektasi yang ditentukan.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, diperlukan komitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi, kecepatan informasi, dan agilitas dalam berbagai aspek mendorong kami untuk terus menerus memberikan yang terbaik. Kolaborasi dan sinergi dengan seluruh pengguna layanan dan juga memastikan masyarakat memahami tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Pekanbaru menjadi hal yang terus menerus kami kuatkan dan kami bangun keselarasannya. Seluruh capaian kinerja yang terhubung dengan tugas dan fungsi maupun kinerja lainnya tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak dan kami sangat yakin kerjasama yang telah dibangun perlu dan harus terus ditingkatkan. Mengawal seluruh proses kerja dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan, pelaksanaan tugas dan fungsi diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini juga tidak terlepas dari dukungan, kontribusi, dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran KPKNL Pekanbaru yang telah berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja organisasi, disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayahNya.

Pekanbaru,
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Maulina Fahmilita





Daftar Isi

PENGANTAR.....	2
BAB I - PENDAHULUAN.....	10
A. LATAR BELAKANG	10
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
1. Fungsi	11
2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	11
C. PERAN STRATEGIS	14
1. Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara	14
2. Pelayanan Penilaian.....	15
3. Pelayanan Piutang Negara	16
4. Pelayanan Lelang	16
5. Seksi Kepatuhan Internal (KI)	17
6. Seksi Hukum dan Informasi (HI).....	17
7. Subbagian Umum.....	18
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	18
BAB II - PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. RENCANA STRATEGIS.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA.....	21
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	26
1a-CP. Indeks Integritas	26
1b-CP. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.....	29
2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	35
2a-CP. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	35
2b-CP. Persentase realisasi pokok lelang	39
2c-CP. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara.....	41

3. Sasaran Strategis 3 : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	43
3a-CP. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	44
3b-N. Indeks kepuasan pengguna layanan.....	46
4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan tata kelola aset yang efektif	48
4a-CP. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	48
4b-CP. Persentase evaluasi kinerja BMN.....	51
4c-N. Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN hulu migas.....	53
5. Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	55
5a-CP. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	56
5b-CP. Tingkat kualitas layanan penilaian	58
5c-CP. Persentase produktivitas lelang.....	60
6. Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	61
6a-CP. Indeks kualitas kinerja anggaran.....	61
6b-N. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa.....	64
6c-N. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	66
7. Sasaran Strategis 7 : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	67
7a-CP. Indeks penanganan permasalahan hukum.....	67
7b-N. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	69
8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	72
8a-N. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	72
8b-N. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	74
B. REALISASI ANGGARAN DJKN TAHUN ANGGARAN 2025 PER PROGRAM/KEGIATAN	76
C. KINERJA LAINNYA	77
a. Inovasi	77
1. Nama Inovasi: MEDALI (Melayani Dari Aplikasi).....	78
2. Nama Inovasi: KPKNL Pekanbaru Festival (Pekanfest).....	79

3. Nama Inovasi: Learning While Working (LWW)	82
4. Nama Inovasi: Pekanpedia (inovasi).....	83
5. Nama Inovasi: Semarak Melaju	85
6. Nama Inovasi: Pekan Informasi dan Layanan On The Streets (PILOTS)	86
b. Program Sinergi	89
1. Nama Program: Kekayaan Negara (KN) Award.....	89
2. Nama Program: Implementasi Eco Office.....	94
3. Nama Program: Pembinaan Mental.....	96
4. Nama Program: Forum Konsultasi Publik	101
D. PENGHARGAAN	103
BAB IV – PENUTUP	104
LAMPIRAN	105

Daftar Tabel

Tabel 1 Komposisi Fungsional Teknis KPKNL Pekanbaru.....	12
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu Three KPKNL Pekanbaru Tahun 2025	24
Tabel 3 Realisasi IKU Indeks Integritas.....	27
Tabel 4 Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.....	30
Tabel 5 Capaian IKU PNBP Lelang.....	34
Tabel 6 Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara.....	37
Tabel 7 Capaian IKU Realisasi Pokok Lelang.....	40
Tabel 8 Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	42
Tabel 9 Capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	45
Tabel 10 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	47
Tabel 11 Realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	49
Tabel 12 Realisasi Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN	52
Tabel 13 Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu migas	54
Tabel 14 Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara.....	57
Tabel 15 Tingkat kualitas layanan penilaian.....	59
Tabel 16 Persentase produktivitas lelang.....	60
Tabel 17 Indeks kualitas kinerja anggaran	63
Tabel 18 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	65
Tabel 19 Persentase pengembangan kompetensi pegawai	66
Tabel 20 Indeks penanganan permasalahan hukum.....	68
Tabel 21 Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID).....	71
Tabel 22 Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.....	73
Tabel 23 Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	75
Tabel 24 IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Pekanbaru	78
Tabel 25 Edukasi dan Komunikasi PekanFest 2025	80
Tabel 26 Kegiatan Pemberdayaan UMKM PekanFest 2025	80
Tabel 27 Tabel Capaian Realisasi PNBP Tahun 2025.....	83
Tabel 28 Tabel Capaian Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	84
Tabel 29 Tabel Capaian Persentase Produktivitas Lelang.....	86
Tabel 30 Tabel Realisasi Capaian Pelaksanaan PILOTS KPKNL Pekanbaru.....	87
Tabel 31 Customer Perspective KPKNL Pekanbaru.....	87
Tabel 32 Penerima Apresiasi Stakeholder KPKNL Pekanbaru Tahun 2025	92
Tabel 33 Realisasi IKU Persentase evaluasi kinerja BMN	92
Tabel 34 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang	93
Tabel 35 Penghematan Energi KPKNL Pekanbaru Semester I Tahun 2025.....	95
Tabel 36 Penghematan Energi KPKNL Pekanbaru Semester II Tahun 2025.....	95

Tabel 37 Capaian Implementasi Program Bintang KPKNL Pekanbaru Tahun 2025	98
Tabel 38 Capaian IKU Customer Perspective	101
Tabel 39 Penerimaan Penghargaan Tahun 2025	103

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru	12
Gambar 2 Statistik Generasi Pegawai KPKNL Pekanbaru.....	13
Gambar 3 Diagram Jenis Kelamin Pegawai KPKNL Pekanbaru.....	13
Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai KPKNL Pekanbaru.....	14
Gambar 5 Peta Strategi.....	22
Gambar 6 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Pekanbaru Tahun 2025.....	25
Gambar 7 Diagram Capaian IKU KPKNL Pekanbaru Tahun 2025.....	26
Gambar 8 Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2025.....	77

BAB I - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Pekanbaru merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Fungsi

- (a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- (b) Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- (c) Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- (d) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- (e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- (f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- (g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- (h) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- (i) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- (j) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan PMK nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam menjalankan tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, Kepala KPKNL dibantu oleh 5 (lima) Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan 4 (empat) Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jabatan Pengawas
 1. Subbagian Umum;
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
 3. Seksi Piutang Negara;

4. Seksi Hukum dan Informasi;
 5. Seksi Kepatuhan Internal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Saat ini di KPKNL Pekanbaru terdapat 5 (lima) orang Pejabat Fungsional Pelelang dan 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah. Namun demikian, terdapat beberapa pegawai yang telah diangkat menjadi fungsional teknis di lingkungan DJKN. Pada Tabel ditunjukkan sebaran pejabat fungsional teknis pada KPKNL Pekanbaru. Beberapa jabatan fungsional teknis di lingkungan KPKNL Pekanbaru di antaranya Juru Sita Piutang Negara, Pejabat Lelang Kelas I, Penilai Pemerintah, dan Pemeriksa Piutang Negara.

c.

No	Fungsional Teknis	Jumlah
1	Juru Sita	1
2	Pejabat Lelang Kelas 1	5
3	Penilai	4
4	Pemeriksa	1

Tabel 1 Komposisi Fungsional Teknis KPKNL Pekanbaru

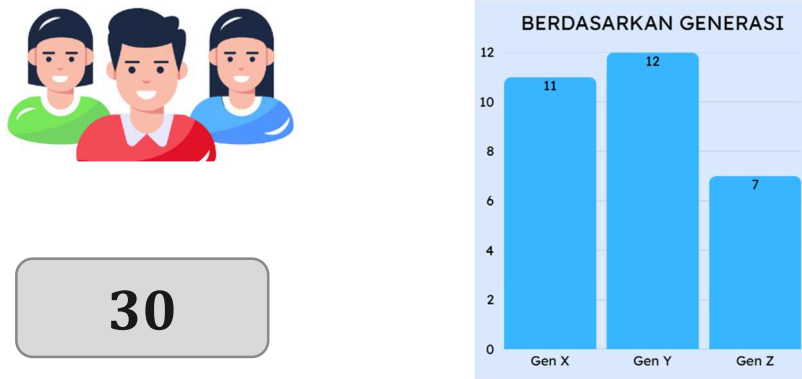
Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru



Gambar 1 Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru

Sumber daya manusia yang ada di KPKNL Pekanbaru sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 30 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi,

keuangan, bisnis, hukum, teknik, sosial, dan lain-lain, yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian/Seksi), 9 Pejabat Fungsional, dan 15 Pelaksana.



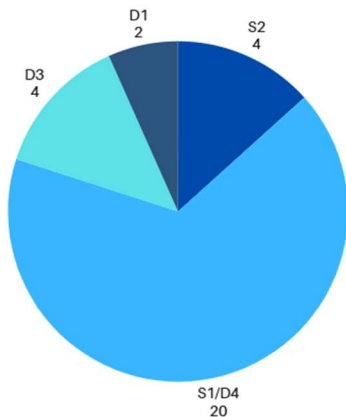
Gambar 2 Statistik Generasi Pegawai KPKNL Pekanbaru

BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Gambar 3 Diagram Jenis Kelamin Pegawai KPKNL Pekanbaru

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



Gambar 4 Diagram Tingkat Pendidikan Pegawai KPKNL Pekanbaru

C. PERAN STRATEGIS

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi misi serta tujuan organisasi, KPKNL Pekanbaru berpegang teguh pada visi Kementerian Keuangan serta visi dan misi DJKN.

Mewujudkan Visi tersebut, KPKNL Pekanbaru memiliki 4 (empat) layanan utama yang berperan strategis, yaitu :

1. Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara

Mewujudkan misi DJKN dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara, mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum, serta meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara, Seksi PKN, melayani lebih dari 400 (empat ratus) *stakeholder*.

Selain pelayanan pengelolaan kekayaan negara dari hulu ke hilir, KPKNL Pekanbaru terus mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola asset melalui berbagai kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, *forum group discussion (FGD)*, dan aktif menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di lingkup satuan kerja maupun pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara serta pencapaian target kinerja terkait pengelolaan kekayaan negara yang menjadi isu utama di seksi PKN dimana cukup banyak indikator kinerja utama yang rentang kendalinya rendah. Salah satu diantaranya adalah target Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara yang pencapaiannya membutuhkan koordinasi dan waktu karena keputusan satuan kerja untuk aktif berkontribusi mengoptimalkan penggunaannya memiliki berbagai bentuk penyelesaian karena pelimpahan kewenangan yang dimiliki.

2. Pelayanan Penilaian

Mewujudkan misi memberikan nilai objektif atas kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan, KPKNL Pekanbaru aktif memberikan layanan Penilaian Kekayaan Negara. Pelayanan penilaian tidak saja untuk keperluan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah tapi juga untuk berbagai keperluan dalam pemindahtanganan maupun pemanfaatan BMN/D.

Para fungsional Penilai Pemerintah di KPKNL Pekanbaru, melayani lebih dari 400 (empat ratus) pengguna jasa yang terdiri dari Satuan Kerja, Pemerintah Daerah serta BUMN/BUMD. Kontribusi lain yang diberikan para fungsional penilai tersebut termasuk didalamnya sebagai narasumber dalam menguatkan peran para fungsional penilai di kota dan kabupaten, melakukan bimbingan teknis untuk pembentukan tim penaksir di daerah serta menjadi *asset advisory* dalam peningkatan pendapatan melalui optimalisasi aset.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penilaian, permasalahan yang cukup signifikan adalah penggunaan aplikasi SIP yang belum familiar dan belum terintegrasi dengan aplikasi persuratan Satu Kemnekeu sehingga pemenuhan tenggat waktu penyelesaian layanan penilaian yang berbasiskan perhitungan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).

3. Pelayanan Piutang Negara

Sebagai salah satu unit yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, Seksi Piutang Negara berperan dalam meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara. Seksi piutang negara juga mempercepat penyelesaian piutang negara dan daerah guna memastikan pengembalian hak tagih negara/daerah.

Melayani lebih dari 80 stakeholders yang terdiri dari Satuan Kerja vertikal, Pemerintah Daerah, dan Penanggung hutang. Seksi Piutang Negara didukung oleh Juru Sita dan Pemeriksa Piutang Negara terus aktif meningkatkan pengurusan piutang negara, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah serta badan hukum lainnya.

Seksi Piutang Negara yang harus memenuhi target penurunan *outstanding* piutang negara serta target PNBPN memiliki dinamika tantangan tersendiri, dimana hampir 90% BKPN yang dikelola memiliki kualitas yang rendah karena mayoritas tidak ada barang jaminan.

4. Pelayanan Lelang

Melaksanakan misi DJKN untuk mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, KPKNL Pekanbaru aktif memberikan layanan lelang kepada lebih dari 500 stakeholder, yang didukung oleh para fungsional Pelelang.

Pelayanan lelang yang dilakukan memberikan dampak tidak saja pada PNBPN dari bea lelang tetapi juga meningkatkan perekonomian daerah dari transaksi jual beli, juga menambah PAD pemerintah setempat atas pembayaran BPHTB.

Mewujudkan pencapaian target kinerja lelang, permasalahan yang dihadapi adalah sulit tercapainya target pokok lelang dan PNBPN dari bea lelang. Hal ini terjadi karena rendahnya hasil penjualan secara lelang yang ditandai dengan masih banyaknya lelang Tidak Laku. Selain itu, masih sering terjadi proses Lelang Batal yang disebabkan penjual membatalkan permohonan lelang maupun yang dibatalkan karena persyaratan lelang tidak lengkap/tidak terpenuhi, serta masih kerapnya wanprestasi dari peserta lelang.

Memastikan pelayanan kekayaan negara dan lelang yang menjadi tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, agar berjalan sesuai harapan, unit teknis layanan dimaksud, didukung penuh oleh tiga supporting unit, yaitu:

5. Seksi Kepatuhan Internal (KI)

Sebagai Unit Kepatuhan Internal (UKI) Tingkat III, Seksi KI memastikan quality assurance atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. UKI di KPKNL Pekanbaru juga merupakan Unit Pengendali Gratifikasi yang aktif menjaga semangat anti Korupsi dan Anti Gratifikasi serta menghidupkan nilai integritas dengan berbagai aktivitas. Seksi KI juga memastikan seluruh layanan dilaksanakan sesuai ketentuan dengan fokus pada pelayanan prima.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UKI memiliki tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta budaya integritas di seluruh lini pelayanan KPKNL Pekanbaru. Ditambah di tahun 2025, KPKNL Pekanbaru memiliki tantangan untuk menjaga keberlanjutan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6. Seksi Hukum dan Informasi (HI)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekanbaru mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, laporan akuntabilitas, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi secara umum, terdapat beberapa isu utama diantaranya dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara dengan tantangan utama terletak pada tingginya risiko ketidakhadiran dalam agenda persidangan akibat kepadatan jadwal agenda persidangan perkara. Pada layanan informasi publik dan kehumasan, tuntutan atas transparansi informasi publik dan penyajian informasi yang cepat, akurat, mudah dipahami, serta konsistensi publikasi di seluruh kanal komunikasi

menjadi tantangan peran Seksi Hukum dan Informasi dalam menjaga kualitas pengelolaan informasi publik.

7. Subbagian Umum

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Subbagian Umum KPKNL Pekanbaru mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum serta dalam pencapaian target kinerja di Subbagian Umum, *strategic issues* yang paling signifikan terjadi pada tahun 2025, diantaranya: Penguatan penatausahaan risalah lelang dan pengelolaan arsip untuk menjamin tertib administrasi, kemudahan akses, dan keamanan dokumen sering terkendala karena sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain itu, optimalisasi realisasi anggaran tahun berjalan menghadapi tantangan kebijakan efisiensi dan penerapan blokir anggaran pemerintah.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, latar belakang, tugas, fungsi, dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan rencana strategis dan visi misi KPKNL Pekanbaru, sasaran strategis, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuannya.

a. Rencana Strategis

b. Perjanjian Kinerja

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang:

1. Capaian Kinerja Organisasi

2. Realisasi Anggaran
3. Kinerja Lainnya
4. Bab IV. Penutup
5. LAMPIRAN

Bagian ini berisi:

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lainnya yang dianggap perlu.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, DJKN berperan mendukung pencapaian tujuan Kemenkeu melalui sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai yaitu Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, Pembiayaan dan Risiko yang Akuntabel, *Prudent*, dan Inovatif. Adapun Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah:

- a) Identifikasi dan evaluasi BMN *underutilized*
- b) Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN.

Untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu, DJKN telah menetapkan Tujuan DJKN tahun 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.
- 2) Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
- 3) Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
- 4) Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Sejalan rencana strategis DJKN, KPKNL Pekanbaru turut melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

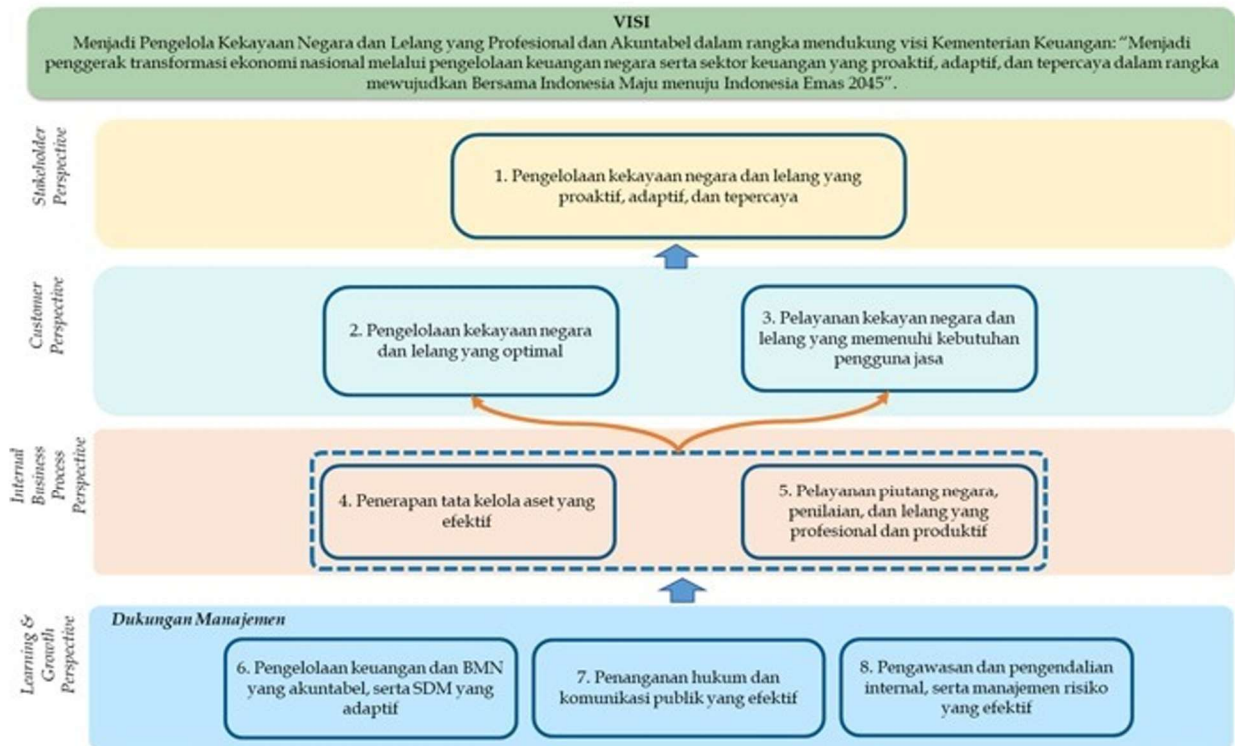
- a. pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;

- b. implementasi perencanaan kebutuhan BMN (asset planning) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;
- c. membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset (quick wins);
- d. mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker;
- e. digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
- f. mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Peta Strategi



Gambar 5 Peta Strategi

Peta Strategi Kemenkeu *Three* menerapkan 4 perspektif, yaitu:

1. *stakeholders perspective*,
2. *customer perspective*,
3. *internal process perspective*, dan
4. *learning and growth perspective*.

Customer perspective berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Pekanbaru harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pekanbaru. Sasaran Strategis KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu Three Tahun 2025. Peta Strategis Kemenkeu Three Tahun 2025 memuat 8 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

Kode	IKU	Polarisasi	V/C	Target
	Stakeholder Perspective (30%)	30%		
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya			
1a-CP	Indeks Integritas	MAX	P/M	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	MAX	P/M	100%
	Customer Perspective (20%)	20%		
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa			
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	MAX	P/L	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	MAX	P/L	100%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	MAX	P/M	100%
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	MAX	P/M	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	MAX	P/M	77
	Internal Process Perspective (25%)	25%		
4	Penerpaan tata kelola aset yang efektif			
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	MAX	P/M	100%

4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	MAX	P/M	100%
4C-N	Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas	MAX	P/M	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif			
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	MAX	P/M	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	MAX	P/M	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	MAX	P/M	80%
	Learning and Growth Perspective (25%)	25%		
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif			
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	MAX	P/M	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	MAX	P/M	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	MAX	P/M	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif			
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	MAX	P/M	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	MAX	P/M	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif			
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	MAX	P/M	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	MAX	P/M	100

Tabel 2 Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu Three KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 110.26%.

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:



Gambar 6 Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

Selama tahun 2025, KPKNL Pekanbaru memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau dan 2 IKU berstatus kuning.

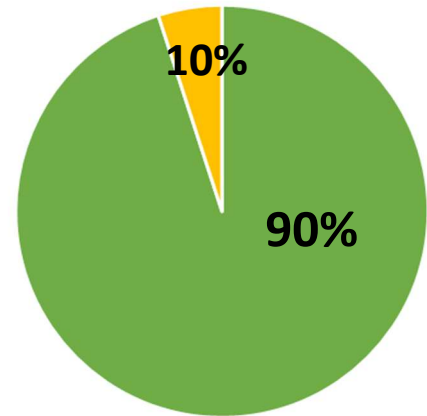
Diagram Capaian IKU KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

KUNING (10%)

- Presentaserealisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
- Presentase realisasi pokok lelang

HIJAU (90%)

- Indeks integritas
- Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara
- Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara
- Indeks kepuasan pengguna layanan
- Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
- Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan
- Persentase evaluasi kinerja BMN
- Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu migas
- Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara
- Tingkat kualitas layanan penilaian
- Persentase produktivitas lelang
- Indeks kualitas kinerja anggaran
- Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- Persentase pengembangan kompetensi pegawai
- Indeks penanganan permasalahan hukum
- Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
- Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko
- Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM



Gambar 7 Diagram Capaian IKU KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya

Kontribusi pengelolaan kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian dapat berupa kontribusi penerimaan negara kepada APBN dan kontribusi lelang terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 2 (dua) IKU. Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1a-CP. Indeks Integritas

1. Deskripsi Kinerja

Indeks integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik

dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan yang dinilai menggunakan Survei Penilaian Integritas.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut

<p><i>Indeks Integritas Murni + Apresiasi (5 poin)</i></p> <p><i>Indeks Integritas Murni = Indeks Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%)</i></p> <p><i>Faktor Koreksi = OTT/Fraud (40% x skor) + Audit Investigasi APH dan IBI (30% x skor) + Pengondisian oleh UE I (20% x skor) + Informasi APH (10% x skor)</i></p>
--

3. Analisis Kinerja

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 105,29% dari target 100%, sehingga perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Target, realisasi, dan capaian IKU sebagai berikut.

KPKNL Pekanbaru	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1a-CP. Indeks Integritas							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/AVG
Realisasi	-	-	-	-	-	105.29%	105.29%	
Capaian	-	-	-	-	-	105.29%	105.29%	

Tabel 3 Realisasi IKU Indeks Integritas

Tantangan atas IKU ini cukup besar karena kendali IKU tidak sepenuhnya ada di KPKNL Pekanbaru. Namun demikian, KPKNL Pekanbaru terus berkomitmen menjaga integritas, dengan memastikan keberlanjutan implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, serta senantiasa memastikan kedisiplinan dan penerapan budaya organisasi dan budaya kerja Kementerian Keuangan.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Integritas, secara nasional telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud antara lain:

- 1) Pelaksanaan identifikasi titik rawan (*risk profiling*) terhadap potensi praktik gratifikasi didukung oleh adanya komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif unit kerja dalam proses pemetaan risiko
- 2) Penyusunan profil risiko yang sistematis dan berbasis pada proses bisnis memungkinkan organisasi mengidentifikasi area berisiko tinggi secara lebih akurat. Selain itu, integrasi kegiatan risk profiling dengan kerangka SPIP dan manajemen risiko mendorong konsistensi pelaksanaan serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan gratifikasi.
- 3) Pelaksanaan kampanye dan internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin secara berkelanjutan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pegawai.
- 4) Penyampaian materi secara rutin melalui berbagai media dan forum internal.
- 5) Pencapaian IKU Indeks Integritas juga telah memperhatikan prinsip *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dimana seluruh pegawai dan pemangku kepentingan memiliki akses yang setara terhadap informasi dan kebijakan integritas tanpa membedakan gender, disabilitas, maupun latar belakang sosial, melalui media komunikasi internal yang inklusif.

Dalam upaya mendukung capaian IKU Indeks Integritas, KPKNL Pekanbaru telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis antara lain:

- 1) Melaksanakan Internalisasi Budaya Kemenkeu Satu

- 2) Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Anti Korupsi
- 3) Publikasi dan edukasi publik yang masif melalui sosial media
- 4) Penyampaian pesan rutin oleh pimpinan terkait dengan integritas
- 5) Monitoring dan evaluasi secara rutin oleh Unit Kepatuhan Internal
- 6) Menyampaikan laporan monitoring pengelolaan pengaduan di lingkungan KPKNL Pekanbaru
- 7) Mengikuti *Town Hall Meeting* Penguatan Integritas
- 8) Mengikuti Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas pada 2025
- 9) Mengikuti Survei Penilaian Integritas pada 2025

1b-CP. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

1. Deskripsi Kinerja

Nilai manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Nilai manfaat pada lingkup KPKNL diperoleh dari:

a. PNBPN Aset:

- penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara;

b. PNBPN Piutang Negara:

Penerimaan dari biaya administrasi pengurusan piutang negara

c. PNBPN Lelang

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian,
- bea lelang batal atas permintaan penjual
- biaya permohonan lelang,

- uang jaminan pembeli wanprestasi,
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\text{Capaian Komponen} = \frac{\text{Realisasi PNBP Aset; PN; Lelang}}{\text{Target PNBP Aset; PN; Lelang}}$$

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang}}{\text{Target Total PNBP}} \times 100\%$$

3. Analisis Kinerja

Secara umum, untuk IKU Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar Rp 28.127.782.801,00 dari target Rp 29.271.343.461,00. Realisasi capaian terhadap target sebesar 96.09% (Kuning). Kinerja PNBP bersumber dari PNBP aset, PNBP PN, dan PNBP lelang. Masing-masing komponen tersebut memiliki target dan realisasi di tahun 2025 sebagai berikut:

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya			
1b-CP. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang			
Komponen	Target	Realisasi	Capaian
PNBP Aset	Rp 17.867.143.461	Rp 18.900.131.290	105.78%
PNBP PN	Rp 24.200.000	Rp 112.656.373	465.52%
PNBP Lelang	Rp 11.380.000.000	Rp 9.114.995.138	80.10%
Total	Rp 29.271.343.461	Rp 28.127.782.801	96.09%

Tabel 4 Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Berdasarkan komponen penerimaan, PNBP Aset mencatat kinerja yang sangat optimal dengan realisasi sebesar Rp18.900.131.290 dari target Rp17.867.143.461, atau mencapai 105,78%. Capaian ini menunjukkan efektivitas

pengelolaan dan pemanfaatan aset negara yang semakin optimal serta meningkatnya kontribusi aset terhadap penerimaan negara.

Sementara itu, PNBPN juga menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan realisasi sebesar Rp112.656.373 dari target Rp24.200.000, atau mencapai 465,52%. Tingginya capaian ini dipengaruhi oleh adanya lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara wilayah kerja KPKNL Pekanbaru.

Di sisi lain, PNBPN Lelang terealisasi sebesar Rp9.114.995.138 dari target Rp11.380.000.000, atau 80,10%. Capaian ini masih berada di bawah target yang ditetapkan, yang antara lain dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, minat pasar, serta karakteristik objek lelang yang memengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan lelang.

Secara keseluruhan, meskipun target total penerimaan belum sepenuhnya tercapai, kinerja penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang tetap menunjukkan tren positif.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Penjelasan masing-masing jenis sumber PNBPN sebagai berikut :

- a. PNBPN Aset, *Unit In Charge* (UIC) PNBPN Aset adalah Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 3 (tiga) Staf/Pelaksana.

Realisasi capaian PNBPN Aset dari segi nilai, berkontribusi paling besar. Realisasi sebesar Rp 18.900.131.290. Adapun upaya yang telah dilaksanakan oleh Seksi PKN, diantaranya :

1. Melakukan penggalan potensi aset yang potensial dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan. Penggalan potensi ini juga termasuk didalamnya aset rampasan dan tegahan yang ada di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru.
2. Koordinasi aktif dengan satuan kerja agar satuan kerja menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Pekanbaru.

3. Menggelar Forum Konsultasi Publik Standar Layanan Pengelolaan Kekayaan Negara dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi layanan, menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan pengguna layanan.
 4. Penguatan koordinasi internal dengan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan Jabatan Fungsional Pelelang terkait dengan perencanaan hingga eksekusinya sehingga PNBPAset dapat optimal.
 5. Sinergi dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dalam Kompetisi Inovasi Manajemen Aset DJKN Tahun 2024/2025 (KOIN MAS DJKN 24/25) yang menghasilkan pemanfaatan lahan milik Stasiun TVRI Riau sebagai objek optimalisasi KOIN MAS DJKN 24/25 pada KPKNL Pekanbaru, dengan kontribusi PNBPAset sebesar Rp1.017.306.750,00.
 6. Sinergi dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau dalam Kompetisi Inovasi Manajemen Aset DJKN Tahun 2025/2026 (KOIN MAS DJKN 25/26) yang menghasilkan pemanfaatan lahan milik LPP RRI Pekanbaru sebagai objek optimalisasi KOIN MAS DJKN 25/26 pada KPKNL Pekanbaru, dengan kontribusi PNBPAset sebesar Rp3.340.914.000,00.
 7. Membangun *stakeholder intimacy* dengan mengadakan sosialisasi strategi optimalisasi aset dan apresiasi *stakeholder*.
- b. PNBPAset Piutang Negara (PN), UIC PNBPAset PN adalah Seksi Pelayanan Piutang Negara yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi dengan 1 (satu) orang Staf/Pelaksana.
- Realisasi capaian PNBPAset PN sebesar 465.52% dari target yang ditetapkan. Capaian yang melebihi target secara signifikan terjadi karena pelaksanaan lelang barang jaminan PUPN.
- Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Seksi Piutang Negara adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemasaran barang jaminan PUPN yang akan dilelang secara massif melalui media sosial, media massa, dan berbagai kanal informasi.

2. Melakukan penggalian potensi piutang negara kepada penyerah piutang di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru
 3. Menggelar FGD bersama pemerintah daerah dalam rangka akselerasi pengurusan piutang daerah
 4. Meningkatkan budaya literasi terkait Piutang Negara melalui penayangan artikel pada website KPKNL Pekanbaru, publikasi artikel di media cetak, dan penerbitan majalah elektronik PekanPedia yang memuat berbagai informasi tentang pengurusan piutang negara dan daerah.
 5. Mendampingi pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi terkait pengelolaan piutang daerah.
 6. Mengoptimalkan pengurusan Piutang Negara melalui surat paksa, penagihan langsung, dan penelitian lapangan, serta mengingatkan para debitur untuk menyelesaikan sisa hutangnya melalui peningkatan angsuran.
 7. Menggelar Forum Konsultasi Publik terhadap standar layanan piutang negara dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi layanan, menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan pengguna layanan.
 8. Mengadakan sosialisasi kepada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru guna mengakselerasi Penyelesaian Piutang Negara/Daerah berdasarkan PMK 52/2024 tentang Pengurusan Piutang Macet pada Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik oleh Panitia Urusan Piutang Negara
- c. PNBP Lelang, UIC PNBP Lelang adalah Jabatan Fungsional Pelelang untuk PNBP Lelang PL I dan Kepala Kantor untuk PNBP Lelang Pegadaian. KPKNL Pekanbaru memiliki 5 (lima) JF Pelelang dengan rincian 2 (dua) JF Pelelang Ahli Pertama dan 3 (tiga) JF Pelelang Ahli Muda. Secara keseluruhan capaian PNBP Lelang adalah 80.10%. Rincian capaian dimaksud adalah

	Target	Realisasi
PNBP Lelang PL Kelas I	10.580.000.000	7.875.350.176
PNBP Lelang Pegadaian	800.000.000	1.205.945.624
Total	11.380.000.000	9.081.295.800

Tabel 5 Capaian IKU PNBPN Lelang

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target adalah:

1. Melakukan penggalan Potensi Lelang kepada satker, Pemerintah Daerah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, serta secara kolaboratif menyelenggarakan sinergi peningkatan potensi penerimaan negara dari lelang sukarela.
2. Mendorong percepatan permohonan penjualan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan penjualan dari pengelola barang.
3. Menggelar bimbingan teknis bagi pemohon lelang sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas permohonan lelang
4. Menggelar Forum Konsultasi Publik terkait standar layanan Lelang dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan lelang untuk menampung kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan pengguna layanan.
5. Melakukan sosialisasi implementasi portal lelang Gen.2 kepada pengguna layanan
6. Melakukan koordinasi dengan PT. Pegadaian terkait dengan potensi dan realisasi capaian PNBPN Lelang
7. Ekspose tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru ke Pemerintah Daerah
8. Publikasi konten media sosial terkait info lelang dan dialog interaktif di media TVRI dan radio
9. Membuka *booth* layanan pendaftaran akun lelang dan konsultasi serta menggelar simulasi lelang sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat pada area *Car Free Day (CFD)* Kota Pekanbaru
10. Lelang serentak Kemenkeu Satu Riau pada peringatan HORI 79

11. Mendorong peningkatan lelang sukarela melalui peningkatan lelang UMKM dan permohonan lelang sukarela perorangan
12. Monitoring dan evaluasi kinerja para pejabat lelang terkait penyelesaian proses verifikasi yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan

2. Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Uraian IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

2a-CP. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

1. Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN

dengan SBSK. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila:

- a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (*zero idle*)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (*cost saving*) dan PNB (revenue generating).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain *cost saving* dan *revenue*), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset.

2. Formula Pengukuran Kinerja

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \text{Capaian IKU} = 75\% \text{ Formula Pengukuran} + 25\% \text{ Formula Optimalisasi}$$

$$\text{Formula Pengukuran} = \text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{n1 + n2 + n3 + n4}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja

x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja

$$\text{Formula Optimalisasi} = \text{Rata-Rata Tertimbang} = \frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{n1 + n2 + n3 + n4}$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja

x = rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja + $n3 +$

3. Analisis Kinerja

Tahun 2025 IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara merupakan salah satu IKU pada level Kemenkeu-Wide. IKU ini merupakan IKU baru dengan target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 110%. Rincian capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara sebagaimana tabel dibawah ini.

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/AVG
Realisasi	118.33%	118.33%	118.33%	88.33%	88.33%	110%	110%	
Capaian	118.33%	118.33%	118.33%	88.33%	88.33%	110%	110%	

Tabel 6 Capaian IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pelaksanaan IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada KPKNL Pekanbaru selama tahun berjalan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target kinerja ditetapkan sebesar 100% pada setiap periode pengukuran (Triwulan I s.d. Triwulan IV) serta secara tahunan.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi kinerja pada Triwulan I dan Triwulan II masing-masing mencapai 118,33%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan layanan pengelolaan aset negara yang mampu menjawab kebutuhan pengguna jasa secara optimal, baik dari sisi kualitas layanan, ketepatan waktu, maupun pemenuhan standar pelayanan.

Pada Triwulan III, realisasi kinerja tercatat sebesar 88,33%, berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mewujudkan optimalisasi aset yang dilakukan oleh setiap satuan kerja, dimana proses di masing-masing K/L dan kantor vertikal dibawahnya memiliki kekhasan dan dinamika tersebut sehingga membutuhkan waktu untuk memastikan output atas proses dapat terwujud. Meski demikian, capaian ini tetap berada pada tingkat yang relatif baik dan dapat dijadikan dasar evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Memasuki Triwulan IV, kinerja kembali menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 110%, melampaui target tahunan. Hal ini menandakan kuatnya koordinasi dan sinergi yang dibangun oleh UIC sehingga mampu mengompensasi capaian pada triwulan sebelumnya.

3. Tindakan yang telah dilaksanakan

Pengelolaan BMN menuntut peningkatan efisiensi dan efektifitas pengguna barang dalam mengoptimalkan BMN-nya. Khusus untuk satuan kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru, *review* kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) telah dikoordinasikan sejak awal tahun di awal semester dengan sejumlah satuan kerja. Dengan mengupayakan jalur koordinasi secara tatap muka, maupun memanfaatkan teknologi digital, maka hasil dari SBSK menjadi lebih optimal. Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagai berikut.

- 1) Melakukan jemput bola melalui verifikasi lapangan secara intensif untuk memastikan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset yang *underutilized* (kurang optimal) agar dapat dialihfungsikan atau diutilisasikan lebih lanjut.
- 2) Dalam proses persiapan atau pra peninjauan ke lapangan, koordinasi dilakukan dengan media komunikasi digital.
- 3) Penguatan koordinasi dan komunikasi dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau terkait review atas hasil pengukuran SBSK yang disampaikan
- 4) Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi terbaru dalam proses pemutakhiran data aset secara *real-time*. Hal ini memudahkan monitoring kepatuhan Satuan Kerja (Satker) terhadap regulasi pengelolaan BMN terkini.
- 5) Menyelenggarakan *workshop* dan bimbingan teknis secara berkala kepada seluruh pengelola barang di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru. Fokus utama adalah memberikan pemahaman bahwa kesesuaian SBSK akan berdampak langsung pada efisiensi anggaran belanja pemeliharaan.

2b-CP. Persentase realisasi pokok lelang

1. Deskripsi Kinerja

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Jumlah pokok lelang yang dilaporkan merupakan akumulasi dari dua sumber utama penugasan, yaitu: (1) Pokok Lelang Pejabat Lelang (PL) Kelas I yang mencakup realisasi lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, dan lelang non-eksekusi sukarela yang dipimpin langsung oleh Pejabat Lelang internal KPKNL Pekanbaru. (2) Pokok Lelang Pegadaian yang mencakup realisasi pokok lelang yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian di bawah wilayah binaan dan pengawasan KPKNL Pekanbaru.

2. Formula Pengukuran

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}}{\text{Target Pokok Lelang KPKNL} + \text{Pegadaian}}$$

3. Analisis Kinerja

IKU Persentase realisasi Pokok Lelang pada Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar Rp 260,265,768,263.00 dari target Rp304.030.000.000,00. Realisasi capaian terhadap target sebesar 85.08% (kuning). Ditilik dari rincian jenis lelang, persentase capaian IKU realisasi pokok

lelang didominasi oleh pegadaian. Capaian dari masing-masing komponen hasil lelang sebagaimana tabel berikut.

	Target	Realisasi	Capaian
Pejabat Lelang I	264,500,000,000.00	198,283,520,163.00	74.97%
Pegadaian	40,000,000,000.00	60,297,281,200.00	154.96%
Total	304,030,000,000.00	260,265,768,263.00	85.08%

Tabel 7 Capaian IKU Realisasi Pokok Lelang

Realisasi capaian penerimaan dari hasil lelang pada periode pelaporan tercatat sebesar Rp260.265.768.263 dari target Rp304.030.000.000, atau mencapai 85,08%, dengan status capaian kuning. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat kinerja lelang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun terdapat komponen yang menunjukkan kinerja sangat baik.

Ditinjau berdasarkan jenis lelang, realisasi lelang pegadaian mencatatkan hasil yang optimal sebesar Rp61.982.248.100 dari target Rp40.000.000.000, atau mencapai 154,96%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya aktivitas dan nilai transaksi lelang pegadaian yang melampaui proyeksi awal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik objek lelang yang likuid dan diminati pasar, seperti barang jaminan atau aset bergerak dengan tingkat keberhasilan lelang dan minat peserta cenderung tinggi.

Sementara itu, pada lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp198.283.520.163 dari target Rp264.500.000.000, atau mencapai 74,97%. Capaian ini masih berada di bawah target, yang antara lain dipengaruhi oleh karakteristik objek lelang, nilai limit atas objek, serta faktor lain seperti kondisi pasar dan minat peserta lelang.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Dalam mendukung pencapaian target IKU ini, hal-hal yang dilakukan KPKNL Pekanbaru sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi dan FGD lelang Hak Tanggungan dengan pihak perbankan sebagai peserta kegiatan
- 2) Bimbingan teknis untuk pemohon lelang sukarela (pelaku UMKM) untuk

pelaksanaan lelang sukarela produk UMKM

- 3) Edukasi publik untuk penguatan literasi lelang melalui media sosial, siaran radio RRI, dialog interaktif di TVRI, *podcast*.
- 4) Pengenalan dan pemasaran produk lelang kepada masyarakat melalui Pekan informasi layanan *on the streets* (PILOTS) di area CFD Kota Pekanbaru
- 5) Menggelar Lelang Serentak Kemenkeu SATU Riau dalam rangka peringatan HORI
- 6) Publikasi di instagram dengan kalender khusus promosi objek lelang dalam bentuk katalog

2c-CP. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

1. Deskripsi Kinerja

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara sebelumnya adalah IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara. IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan *Outstanding* Piutang Negara diperoleh dari penurunan *outstanding* piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 (BKPN lama). Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Diselesaikan (Angsuran tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai). Termasuk di dalamnya apabila terdapat penyelesaian piutang negara melalui asset *debt swap*.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Penurunan Nilai Outstanding PN}}{\text{Target Penurunan Nilai Outstanding PN}} \times 100$$

3. Analisis Kinerja

Target awal penurunan nilai piutang negara adalah sebesar Rp2.000.000.000 dan pada bulan Oktober dilakukan addendum terhadap target menjadi Rp 3.184.944.000. Adapun pada akhir tahun 2025 target telah tercapai sebesar Rp 3.347.170.264,23 atau melebihi target sebesar 110%. Penurunan nilai saldo Piutang Negara didominasi oleh Angsuran yang dilakukan rutin oleh debitur serta penerbitan PSBDT atas BKPN yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

KPKNL Pekanbaru	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP. Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	397.500.000	1.200.000.000	1.200.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3.184.944.000	100%	MAX/AV G
Realisasi	457.115.865	2.155.648.616	2.155.648.616	3.183.648.679,8	3.183.648.679,8	3.347.170.264,2	110%	
Capaian	115%	179.64%	179.64%	159.18%	159.18%	110%	110%	

Tabel 8 Capaian IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Penurunan nilai saldo piutang negara pada KPKNL Pekanbaru menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan hingga akhir tahun 2025, realisasi penurunan nilai saldo piutang negara mencapai Rp3.347.170.264,23, atau 105,09% dari target addendum. Capaian ini menegaskan bahwa kinerja pengelolaan piutang negara tidak hanya memenuhi ekspektasi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara periodik, capaian kinerja menunjukkan tren positif di setiap triwulan.

Realisasi penurunan piutang negara pada Triwulan I hingga Triwulan IV secara konsisten berada di atas target triwulanan, dengan persentase capaian yang signifikan.

Dengan capaian kinerja sebesar 110% secara tahunan, indikator “Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara” berada pada kategori sangat baik. Kinerja ini mencerminkan komitmen KPKNL Pekanbaru dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara dan piutang negara secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara.

3. Tindakan yang telah dilaksanakan

Dalam mendukung pencapaian target IKU ini, hal-hal yang dilakukan KPKNL Pekanbaru sebagai berikut.

- 1) Menyurati debitur untuk meningkatkan angsuran pembayaran
- 2) Memetakan debitur berdasarkan potensi yang ada, serta melakukan upaya-upaya penagihan secara optimal
- 3) Memetakan BKPN dan tingkat pemngurusannya dan mendorong proses pengurusan menjadi optimal
- 4) Melakukan sinergi bersama Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengurusan piutang negara

3. Sasaran Strategis 3 : Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara. Dengan berbagai IKU KPKNL Pekanbaru berikut, sasaran strategis ini dapat diwujudkan:

3a-CP. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

1. Deskripsi Kinerja

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis terkait layanan lelang yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan peserta (*stakeholders*) dalam hal pemahaman substansi/materi yang disampaikan melalui pelatihan/ sosialisasi yang dilaksanakan.

IKU ini lebih mengutamakan kualitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan. Efektitas edukasi dan komunikasi diukur melalui kuisisioner yang memuat 4 indikator yaitu tingkat pemahaman peserta, kualitas materi yang disampaikan, kualitas narasumber, dan kualitas tempat pelaksanaan.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi}}{\text{Jafung Pelelang dan Piutang Negara}}$$

3. Analisis Kinerja

IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan IKU baru pada tahun 2025 yang memiliki target sebesar 80 dan realisasi sebesar 122,18. Adapun *trajectory* tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/AVG
Realisasi	98,95	87,43	87,43	87,77	87,77	87,51	87,51	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 9 Capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Berdasarkan capaian diatas diketahui bahwa efektivitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan dalam pembinaan kepada para pengguna jasa baik yang terkait dengan pengelolaan kekayaan negara, putang negara, penilaian maupun lelang, telah berlangsung secara efektif dan optimal. Capaian di semester 1 mengalami peningkatan pada semester 2 dengan poin tertinggi berada pada kegiatan edukasi dan komunikasi pada triwulan III. Berdasarkan capaian ini diasumsikan bahwa transfer knowledge yang dilakukan oleh masing-masing PIC pada unit layanan telah berjalan optimal.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sesuai dengan jenis layanan dengan mengangkat tema yang relevan dan aktual merujuk pada kebutuhan stakeholder.
- 2) Pemilihan/penunjukan narasumber atas materi sosialisasi yang akan disampaikan dilakukan secara prudent untuk mendorong terlaksananya kegiatan edukasi dan komunikasi yang efektif.
- 3) Mekanisme edukasi dan komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi stakeholder serta jenis materi yang disampaikan yang menjadikan edukasi dan komunikasi dilaksanakan dalam berbagai bentuk seperti sosialisasi, FGD, dan bimbingan teknis, serta metode lainnya.
- 4) Penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan pemahaman pengguna layanan.

- 5) Edukasi dan komunikasi satu arah juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai media komunikasi baik itu media sosial instagram dalam bentuk reels, carousel, infografis, serta mengoptimalkan e-magazine Pekanpedia KPKNL Pekanbaru.

3b-N. Indeks kepuasan pengguna layanan

1. Deskripsi Kinerja

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur
- 3) Waktu Penyelesaian
- 4) Biaya/Tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Kompetensi Pelaksana
- 7) Perilaku Pelaksana
- 8) Sarana Prasarana
- 9) Sarana Pengaduan

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (e-SKPL) masing-masing unit}}{\text{...}}$$

3. Analisis Kinerja

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N. Indeks kepuasan pengguna layanan							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/AVG
Realisasi	128.18%	127.01%	127.01%	126.88%	126.88%	126,79	126,79	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 10 Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Pekanbaru menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target sepanjang tahun berjalan. Target yang ditetapkan sebesar 100 pada setiap periode pengukuran, baik triwulanan maupun tahunan, berhasil dilampaui secara konsisten.

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada Triwulan I mencapai 128,18%, kemudian meningkat pada Triwulan II menjadi 127,10%, serta pada Semester I tercatat sebesar 127,01%. Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan kekayaan negara dan lelang yang diberikan oleh KPKNL Pekanbaru.

Pada Triwulan III, realisasi kinerja tercatat sebesar 126,88%, dan secara kumulatif sampai dengan Triwulan III tetap berada pada angka 126,88%. Selanjutnya, pada Triwulan IV terjadi peningkatan capaian dengan realisasi sebesar 126,79%, sehingga secara tahunan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan mencapai 126,79% atau 120% dari target, dan berada pada kategori kinerja sangat baik.

Dengan demikian, capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang tinggi mencerminkan kepercayaan dan kepuasan pengguna terhadap layanan KPKNL Pekanbaru.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Upaya yang telah dilaksanakan untuk tercapainya Indikator Kinerja tersebut

antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan revitalisasi Area Pelayanan Terpadu (APT) yang lebih nyaman, inklusif bagi penyandang disabilitas, serta penyediaan ruang konsultasi yang representatif guna memastikan kenyamanan pengguna layanan saat berkunjung.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital seperti e-Auction, SIMAN v2, dan aplikasi pendukung lokal untuk mempercepat waktu penyelesaian layanan (*turnaround time*). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tatap muka serta memberikan kepastian waktu dan biaya bagi pengguna jasa.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan edukasi berkala kepada Satuan Kerja dan pengguna layanan lelang mengenai tata cara permohonan layanan.
- 4) Memberikan asistensi secara intensif untuk mengurangi tingkat penolakan berkas akibat ketidaklengkapan administrasi.
- 5) Melaksanakan IHT terkait komunikasi pelayanan dan pelatihan service excellence bagi seluruh pegawai dan PPNPN KPKNL Pekanbaru guna menanamkan budaya melayani yang ramah, solutif, dan profesional (3S: Senyum, Sapa, Salam).

4. Sasaran Strategis 4 : Penerapan tata kelola aset yang efektif

Penerapan tata kelola Kekayaan Negara yang efektif merupakan upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara tertib, transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai ketentuan, melalui peningkatan kualitas penatausahaan, optimalisasi pemanfaatan aset, pengamanan fisik-administratif-hukum, serta penyediaan informasi kekayaan negara yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi menjadi 3 IKU yang diuraikan sebagai berikut:

4a-CP. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

1. Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah. Ruang

lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang clean and clear (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang not clean but clear (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang not clean and not clear (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Bidang Tanah Yang Disertifikatkan}}{\sum \text{Target Bidang Tanah Yang Akan Disertifikatkan} + n3 + n4} \times 100\%$$

n = jumlah nup per jenis objek per satuan kerja x = rata-rata

3. Analisis Kinerja

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP. Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	16	127	127	191	191	191	191	MAX/TLK
Realisasi	62	70	70	286	286	384	384	
Capaian	120%	55.12%	55.12%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 11 Realisasi IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan

Realisasi capaian IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan

melampaui target. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% berhasil direalisasikan sebesar 120%, dengan capaian sertipikasi tanah yang melampaui rencana tahunan.

Secara periodik, realisasi sertipikasi BMN berupa tanah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada Triwulan I, realisasi tercatat sebanyak 62 bidang dari target 16 bidang, dengan tingkat capaian sebesar 120%. Pada Triwulan II, realisasi meningkat menjadi 70 bidang, namun secara persentase capaian tercatat sebesar 55,12%, yang menunjukkan adanya penyesuaian terhadap akumulasi target tahunan.

Pada Semester I, capaian kinerja tetap berada pada angka 55,12%, seiring dengan strategi penyelesaian sertipikasi yang dilakukan secara bertahap dan terencana. Memasuki Triwulan III, terjadi percepatan kinerja yang signifikan dengan realisasi sebanyak 286 bidang dari target 191 bidang, sehingga capaian meningkat menjadi 120%. Tren positif ini berlanjut hingga Triwulan IV, dengan total realisasi mencapai 384 bidang dari target 191 bidang, dan capaian kinerja tetap berada pada level 120%.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas penerapan tata kelola aset yang baik, khususnya dalam proses sertipikasi BMN berupa tanah. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi yang intensif dengan instansi terkait, penguatan perencanaan, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan penilaian dan pengamanan aset di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

3. Tindakan yang telah dilaksanakan

Langkah yang diambil KPKNL Pekanbaru dalam mendukung tercapainya IKU ini adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadakan rapat persiapan kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah 2025
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sertipikasi BMN berupa tanah 2025
- 3) Melakukan koordinasi percepatan sertipikasi BMN berupa tanah dengan satker dan kantor pertanahan setempat.
- 4) Mengadakan bimtek tentang tata cara permohonan sertipikat tanah kepada satker target.

- 5) Mengadakan bimbingan teknis dan *updating* data pada aplikasi SIMAN V.2 serta melakukan koordinasi ke satuan kerja berdasarkan prioritas dengan BMN berupa tanah yang belum bersertipikat.
- 6) Koordinasi langsung dengan satker dan kantah yang mengalami perlambatan proses dari *timeline* awal.
- 7) Komunikasi dengan Dit. PKKN dan Kanwil pada persoalan krusial yang butuh penyelesaian cepat.
- 8) Asistensi Peginputan Data Tanah pada Aplikasi Sentuh Tanahku ke masing-masing satuan kerja.
- 9) Menjaga *engagement stakeholder* melalui pemberian penghargaan KN Awards untuk kategori “Kinerja Pensertipikatan BMN Terbaik”

4b-CP. Persentase evaluasi kinerja BMN

1. Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah Mengetahui kinerja aset BMN dan memperbaiki struktur portofolio aset.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{aset yang dievaluasi kinerjanya}}{\sum \text{Target nilai kekayaan negara yang diutilisasi}} \times 100\%$$

3. Analisis Kinerja

Realisasi IKU Presentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN memiliki indeks capaian 110,38% dengan realisasi 400 dari 397 target yang ditetapkan. Komponen IKU portofolio aset terdiri dari evaluasi kinerja BMN dan Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi BMN.

Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4b-CP. Persentase evaluasi kinerja BMN			
Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	397	400	100.76%
Rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker	20	30	120%
Total			110.38%

Tabel 12 Realisasi Capaian IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Komponen pertama, yaitu aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya, menunjukkan capaian sebesar 100,76%, dengan realisasi 400 aset dari target 397 aset. Capaian ini mencerminkan konsistensi dan ketepatan pelaksanaan evaluasi kinerja BMN sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Komponen kedua, yaitu rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja, menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yakni 120%, dengan realisasi 30 rekomendasi dari target 20 rekomendasi. Hasil ini mengindikasikan efektivitas koordinasi dan komunikasi antara KPKNL Pekanbaru dengan satuan kerja pengguna BMN, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata.

3. Tindakan yang telah dilaksanakan

Dalam proses pencapaian IKU ini, dilakukan beberapa strategi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim portofolio aset
- 2) Melakukan survei lapangan dalam rangka pendataan
- 3) Dilakukan pengolahan data ke dalam aplikasi SIMAN Portofolio
- 4) Memberikan rekomendasi dari hasil nilai kinerja aset yang diperoleh dari SIMAN Portofolio
- 5) Menghimbau satuan kerja untuk mengirimkan surat balasan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
- 6) Melakukan koordinasi kembali dengan Satker untuk menindaklanjuti surat persetujuan pengelolaan BMN yang telah ditetapkan
- 7) *Review* laporan sebelum menentukan rekomendasi
- 8) Aktif menghimbau kepada satker serta melakukan pengolahan data ke Aplikasi SIMAN
- 9) Menyelenggarakan berbagai kegiatan inisiatif, diantaranya melalui Lomba Cermat Aset Tk. Korwil BMN bertajuk “Cermat Pengurus Barangnya, Optimal Pengelolaan Asetnya”. Cermat Aset 2025 adalah kegiatan cerdas cermat seputar Pengelolaan Barang Milik Negara, yang akan diikuti oleh setiap Koordinator Wilayah Satker di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru, sebagai sarana edukasi dan peningkatan kompetensi Korwil.

4c-N. Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN hulu migas

1. Deskripsi Kinerja

BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/ *Contract of Work* (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Inventarisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas, adalah kegiatan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN Hulu Migas. Inventarisasi adalah bagian dari penatausahaan BMN Hulu Migas, selain pembukuan dan pelaporan. Inventarisasi dilakukan dengan cara membandingkan data yang tercatat di administrasi dengan kondisi di lapangan atas kondisi, nilai, serta

keberadaan suatu aset. Inventarisasi dilakukan agar tersedia data BMN Hulu Migas secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik.

Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN Hulu Migas pada saat tertentu. Penilaian dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Ketentuan mengenai penilaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah line objek inventarisasi dan penilaian yang telah diselesaikan} / \text{target jumlah line objek inventarisasi dan penilaian} \times 100\%}{}$$

3. Analisis Kinerja

Capaian atas IKU Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu migas dapat dilihat pada tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4c-N. Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu migas							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	105.08	105.08	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	105.08%	105.08%	

Tabel 13 Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu migas

IKU Persentase Penyelesaian Inventarisasi dan Penilaian BMN Hulu Migas pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target. Target kinerja yang ditetapkan sebesar 100% berhasil direalisasikan sebesar 105,08%,

sehingga capaian kinerja berada di atas ekspektasi pada tahun pertama implementasi indikator ini.

Secara periodik, realisasi kinerja pada Triwulan I hingga Triwulan IV tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan konsistensi pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Pada pengukuran tahunan, capaian meningkat menjadi 105,08%, mencerminkan adanya penyelesaian tambahan di luar target yang telah direncanakan.

Sebagai indikator yang baru ditetapkan pada Tahun 2025, IKU ini belum memiliki data historis sebagai pembanding kinerja. Namun demikian, keberhasilan mencapai dan melampaui target pada tahun pertama implementasi menunjukkan tingkat kesiapan manajerial dan teknis yang tinggi, baik dari aspek perencanaan, koordinasi, maupun pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Dalam proses pencapaian IKU ini, KPKNL Pekanbaru melakukan strategi sebagai berikut.

- 1) Melakukan koordinasi dengan direktorat PKKN dan para PIC terkait untuk kepastian jadwal pelaksanaan kegiatan lapangan Inventarisasi dan Penilaian (IP) aset BMN Hulu Migas
- 2) Menyusun strategi penugasan tim IP agar tidak mengalami bentrok penugasan dengan jadwal pelaksanaan keg
- 3) Melakukan koordinasi dengan perwakilan dari SDM dan KKKS terkait untuk kepastian target BMN yang akan dilakukan IP.
- 4) Memastikan proses penyusunan laporan IP diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan.

5. Sasaran Strategis 5 : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Keberhasilan atas SS pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif diukur dengan 3 (tiga) IKU yang meliputi:

5a-CP. Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

1. Deskripsi Kinerja

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, IKU ini juga menggambarkan K/L/Pemda dalam mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan realisasi penyelesaian berkas piutang negara sebagai kriteria capaian IKU meliputi: (1.) Realisasi penyelesaian berkas piutang negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara dengan bobot komponen 1,2; (2.) Realisasi penyelesaian berkas piutang negara melalui PUPN yang tidak menghasilkan penerimaan Negara dengan bobot komponen 1,1; dan (3.) Realisasi penyelesaian berkas piutang negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal dengan bobot komponen 1.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\sum \text{Realisasi Penyelesaian BKPN}}{\sum \text{Target Penyelesaian BKPN}} \times 100$$

3. Analisis Kinerja

Rincian atas pencapaian IKU persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara (BKPN) pada tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP. Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15	15	15	15	15	15	15	MAX/TLK
Realisasi	3	7	7	11	11	16	16	
Capaian	120%	55.12%	55.12%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 14 Persentase realisasi penyelesaian berkas kasus piutang negara

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian BKPN pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian melampaui target, dari target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 120%. Secara jumlah target sebanyak 15 BKPN telah diselesaikan dimana terdapat 1 BKPN selesai dengan pelunasan oleh Penanggung Hutang dan 15 BKPN selesai dengan PSBDT, sehingga total BKPN selesai sebanyak 16. Secara periodik, realisasi penyelesaian BKPN menunjukkan perkembangan yang bertahap dan terukur. Pada Triwulan I, realisasi penyelesaian tercatat sebanyak 3 BKPN dengan capaian sebesar 120%. Pada Triwulan II, realisasi meningkat menjadi 7 BKPN, dengan capaian kumulatif sebesar 55,12%, yang mencerminkan proses penanganan berkas yang bersifat berkelanjutan dan memerlukan waktu penyelesaian lintas periode. Pada Triwulan III, realisasi penyelesaian berkas meningkat signifikan menjadi 11 BKPN, dengan capaian kinerja kembali mencapai 120%. Tren positif ini berlanjut sampai akhir tahun.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Beberapa hal yang telah dilakukan KPKNL Pekanbaru untuk mengoptimalkan penurunan nilai saldo piutang negara selama tahun 2025 sebagai berikut.

- 1) Melakukan penelitian dan pemetaan atas kondisi BKPN dan melanjutkan prosesnya pada tahap pengurusan berikutnya (jika memungkinkan).
- 2) Melakukan optimalisasi penagihan pada debitur potensial, baik itu melalui surat maupun kunjungan langsung.

- 3) Menguatkan koordinasi dengan penyerah piutang untuk mengakselerasi penelitian lapangan dan tindak lanjut penyelesaian.

5b-CP. Tingkat kualitas layanan penilaian

1. Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN), atau Barang jaminan, atau kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN, Aset yang akan ditetapkan statusnya menjadi BMN.

Penilaian secara tepat waktu adalah penilaian yang dilaksanakan selama 15 hari kerja untuk pemindahtanganan, selama 25 hari kerja untuk pemanfaatan yang tanpa SOP link, dan 12 hari kerja untuk Pemanfaatan Sewa dengan SOP link, terhitung setelah tanggal terakhir pelaksanaan survei objek penilaian di lapangan/dilengkapinya data pendukung penilaian oleh pemohon dalam hal terdapat BATKD sampai dengan penyampaian hasil penilaian. Dalam hal penilaian tanpa survei lapangan, perhitungan norma waktu dimulai sejak tanggal terakhir penugasan penilaian. Khusus untuk aset yang belum terdapat SOP nya maka dapat menggunakan norma waktu BMN sesuai dengan tujuan penilaiannya yaitu pemanfaatan 25 hari kerja dan pemindahtanganan 15 hari kerja.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = (40\% \times \text{Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Akurasi Data Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Nilai Hasil Kaji Ulang})$$

3. Analisis Kinerja

Capaian IKU tingkat kualitas layanan penilaian pada KPKNL Pekanbaru di tahun

2025 adalah 120%. Realisasi pada IKU ini adalah sebesar 162,27% dan target yang ditetapkan sebesar 70%. Detil capaian IKU ini ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP. Tingkat kualitas layanan penilaian							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	112,27%	114,43%	114,43%	114,17%	114,17%	113,59%	162,27%	
Capaian	112,27%	114,43%	114,43%	114,17%	114,17%	113,59%	162,27%	

Tabel 15 Tingkat kualitas layanan penilaian

Secara periodik, realisasi kinerja pada setiap triwulan menunjukkan konsistensi capaian di atas target. Pada Triwulan I, realisasi tercatat sebesar 112,27%, meningkat pada Triwulan II menjadi 114,43%, dan pada Semester I mencapai 114,43%. Selanjutnya, pada Triwulan III realisasi tercatat sebesar 114,17%, dan secara kumulatif sampai dengan Triwulan III tetap berada pada angka 114,17%.

Pada Triwulan IV, realisasi kinerja mencapai 113,59%, yang kemudian secara akumulatif mendorong realisasi tahunan menjadi 162,27%. Hasil ini mencerminkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan penilaian, baik dari aspek ketepatan waktu penyelesaian, kesesuaian akurasi data layanan penilaian, maupun kualitas hasil kaji ulang hasil penilaian.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian tinggi dalam IKU ini adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan penyelesaian penilaian dalam batas waktu sesuai dengan SOP.
- 2) Melakukan akselerasi penyelesaian permohonan penilaian.
- 3) Melakukan kolaborasi dan koordinasi yang efektif dengan *stakeholder*.
- 4) Penerapan strategi kerja berbasis prioritas dengan mempertimbangkan dan menggunakan mekanisme First in First Out (FIFO) untuk kepastian layanan kepada pemohon.

5c-CP. Persentase produktivitas lelang

1. Deskripsi Kinerja

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \times 60\% \right) \right)$$

3. Analisis Kinerja

Detil capaian IKU ini ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP. Persentase produktivitas lelang							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	52,65%	65,72%	65,72%	75,59%	75,59%	85.09%	85.09%	
Capaian	112,27%	114,43%	114,43%	114,17%	114,17%	113,59%	162,27%	

Tabel 16 Persentase produktivitas lelang

Realisasi IKU Persentase Produktivitas Lelang pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target. Indeks capaian kinerja tercatat sebesar 162,27%, dengan realisasi sebesar 85.09% dari target yang ditetapkan sebesar 70%. Capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan lelang cukup beragam mulai dari lelang wajib sampai lelang sukarela dan telah berjalan secara produktif.

Secara periodik, realisasi produktivitas lelang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada Triwulan I, realisasi tercatat sebesar 52,65%, kemudian meningkat pada Triwulan II menjadi 65,72%. Capaian ini menunjukkan adanya proses penguatan kinerja lelang secara bertahap pada triwulan I dan triwulan II. Memasuki Triwulan III, realisasi produktivitas lelang meningkat signifikan menjadi 75,59%. Pada Triwulan IV, realisasi kembali meningkat menjadi 85,09%, sehingga realisasi tahunan melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Pekanbaru terkait pencapaian IKU ini meliputi:

- 1) Penggalan potensi lelang pada perbankan, kejaksaan, pemerintah daerah, serta UMKM di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru; dan
- 2) Sosialisasi terkait lelang, baik itu melalui pertemuan langsung maupun media lain seperti surat, media sosial, dan sebagainya kepada mitra KPKNL Pekanbaru.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan bertajuk Selasa Cakap Belajar (SELANCAR) sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas pemohon lelang dari unsur lelang sukarela produk UMKM.

6. Sasaran Strategis 6 : Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Untuk mengukur keberhasilan atas sasaran strategis Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif pada unit supporting ditetapkan IKU sebagai berikut:

6a-CP. Indeks kualitas kinerja anggaran

1. Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$\text{Capaian IKU} =$ $Q1, Q2 \text{ dan } Q3 = 100\% \times \text{IKPA}$ $Q4 = (60\% \times \text{SMART} + 40\% \times \text{IKPA})$
--

3. Analisis Kinerja

Selama tahun 2025 KPKNL Pekanbaru selalu memperoleh nilai 100 untuk IKPA per triwulan. Hal tersebut membuktikan ketelitian luar biasa dalam proses penatausahaan keuangan, yang ditandai dengan tidak adanya kesalahan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan nihilnya Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga, penyampaian LPJ Bendahara, dan pendaftaran data kontrak dilakukan selalu dalam koridor waktu yang ditentukan, dll.

Adapun rincian IKU indeks kualitas kinerja anggaran di tahun 2025 sebagai berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 17 Indeks kualitas kinerja anggaran

Realisasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran (IKPA) pada KPKNL Pekanbaru selama Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Sepanjang tahun, KPKNL Pekanbaru berhasil memperoleh nilai IKPA sebesar 100 pada setiap triwulan, sehingga realisasi kinerja tahunan mencapai 100% dan capaian kinerja tercatat sebesar 120% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan tingkat ketertiban dan kepatuhan yang tinggi dalam pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Tidak ditemukannya kesalahan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kelancaran penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), ketepatan waktu penyelesaian tagihan kepada pihak ketiga, serta ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara menjadi indikator nyata kualitas pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Selain itu, proses pendaftaran dan pemutakhiran data kontrak dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu, sehingga mendukung keandalan data serta kelancaran pelaksanaan anggaran. Konsistensi pencapaian nilai maksimal IKPA pada setiap periode pengukuran menunjukkan bahwa pengendalian internal, pemahaman regulasi, serta koordinasi antarunit kerja telah berjalan dengan efektif.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Beberapa faktor utama yang mendukung capaian ini antara lain:

- 1) Menyusun perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan strategis yang mendukung efektivitas layanan.

- 2) Memastikan pelaksanaan anggaran yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran.
- 4) Meningkatkan kapasitas pengelola anggaran dengan mengikuti pelatihan ataupun penyegaran kompetensi sesuai ketentuan.
- 5) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Sekretariat DJKN dan Kantor Wilayah DJKN RSK untuk kondisi-kondisi krusial yang membutuhkan arahan.

6b-N. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

1. Deskripsi Kinerja

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dihitung dari 2 (dua) komponen. Komponen pertama adalah kualitas pengelolaan pengadaan yang diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri. Komponen kedua meliputi indeks tata kelola pengadaan yang meliputi SIRUP, E-Tendering, EPurchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut

$$\text{Capaian IKU} = \text{Realisasi IKU} = \frac{(\text{Realisasi A} + \text{Realisasi B})}{2} \times 100\%$$

3. Analisis Kinerja

IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 memiliki realisasi capaian sebesar 120 dari target sebesar 100. Realisasi capaian terhadap target sebesar 120% (hijau).

KPKNL Pekanbaru	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 18 Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

IKU Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari realisasi capaian sebesar 120 terhadap target yang ditetapkan sebesar 100. Dengan demikian, tingkat pencapaian kinerja mencapai 120 persen, yang termasuk dalam kategori melampaui target dan berada pada status hijau.

Capaian tersebut konsisten pada setiap periode pelaporan, baik triwulan I, triwulan II, triwulan III, hingga akhir tahun. Konsistensi realisasi di atas target ini mengindikasikan bahwa proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara efektif, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Pekanbaru terkait pencapaian IKU ini meliputi:

- 1) Menggunakan Produk Dalam Negeri dalam setiap pengadaan barang/jasa, terutama untuk kebutuhan operasional kantor dan pemeliharaan sarana prasarana.
- 2) Melakukan penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SIRUP secara tepat waktu di awal tahun anggaran.
- 3) Mengutamakan metode *E-Purchasing* melalui Katalog Elektronik (E-Katalog) untuk belanja rutin.

6c-N. Persentase pengembangan kompetensi pegawai

1. Deskripsi Kinerja

IKI ini mengukur 2 (dua) komponen, yaitu penguatan budaya dan bintal pejabat administrator serta pemenuhan Jam Pelatihan (JP) dan pemanggilan pelatihan. Komponen pertama wajib dilaksanakan oleh Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja. Bentuk penguatan budaya dan pembinaan meliputi kegiatan pembinaan mental dan kegiatan sinergi antar generasi. Komponen kedua mewajibkan bawahan pada unit kerja untuk memenuhi minimal 25 JP serta mengikuti panggilan diklat yang ada.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\text{Capaian IKU} = \frac{(\text{Jumlah Pegawai yang memenuhi 25JP}/\text{Jumlah Pegawai Aktif}) \times 80\% + (\text{Jumlah Pegawai yang Memenuhi Panggilan Pelatihan}/\text{Jumlah Pegawai terpanggil}) \times 20\%}{2}$$

3. Analisis Kinerja

Target tahunan IKU persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 adalah sebesar 80%. Realisasi pada KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 97.03%. dengan demikian, capaian IKU ini di tahun 2025 sebesar 120%. Rincian atas capaian KPKNL Pekanbaru sebagai berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N. Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 19 Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Target tahunan IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2025 ditetapkan sebesar 80%. Realisasi capaian IKU pada KPKNL Pekanbaru mencapai 97,03%. Dengan demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang direncanakan. Realisasi kinerja yang konsisten pada setiap periode pelaporan, baik triwulan I, triwulan II, triwulan III, hingga akhir tahun, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yang efektif dan terukur.

4. Tindakan yang telah dilaksanakan

upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi panggilan diklat yang ada.
- 2) Melakukan konversi jamlat atas kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui sharing knowledge mandiri di KPKNL Pekanbaru
- 3) Mendorong kegiatan penguatan budaya yang meliputi kegiatan pembinaan mental dan kegiatan sinergi antar generasi juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
- 4) Mendorong pegawai melakukan diklat yang sifatnya *open access* melalui <https://klc2.kemenkeu.go.id/>.
- 5) Memastikan Kepala Kantor sebagai *role model leader* mengajar.

7. Sasaran Strategis 7 : Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

2 (dua) IKU yang ditetapkan dalam rangka mengukur keberhasilan atas sasaran strategis penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif meliputi:

7a-CP. Indeks penanganan permasalahan hukum

1. Deskripsi Kinerja

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen, yaitu indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan (bobot 80%) dan indeks putusan perkara berkekuatan hukum tetap

(bobot 20%). Indeks penanganan permasalahan hukum di pengadilan mengukur ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat relaas gugatan/panggilan sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Komponen kedua mengukur bagaimana akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim mempengaruhi tugas dan fungsi DJKN.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi Komponen A: (Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A)} * 100}{\text{Realisasi Komponen B: (Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B)} * 100}$
--

3. Analisis Kinerja

Realisasi IKU Indeks Permasalahan Hukum memiliki indeks capaian 116,08 dari 100 target yang ditetapkan. IKU tersebut belum memiliki data historis karena baru diterapkan di UPK-Three pada tahun 2025. Namun demikian, IKU tersebut sebelumnya telah muncul dan diterapkan pada level Kepala Seksi (Kasi) pada tahun-tahun sebelumnya.

KPKNL Pekanbaru	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP. Indeks penanganan permasalahan hukum							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	117.42%	116.55%	116.55%	116.93%	116.93%	116.08%	116.08%	
Capaian	117.42%	116.55%	116.55%	116.93%	116.93%	116.08%	116.08%	

Tabel 20 Indeks penanganan permasalahan hukum

IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

ditetapkan dengan target sebesar 100. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian IKU mencapai 116,08% pada akhir tahun. Dengan demikian, capaian kinerja telah melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori kinerja sangat baik.

Capaian tersebut didukung oleh realisasi kinerja yang konsisten di atas target pada setiap periode pelaporan. Pada triwulan I realisasi mencapai 117,42%, triwulan II sebesar 116,55%, triwulan III sebesar 116,93%, dan triwulan IV sebesar 116,08%. Konsistensi ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan penanganan permasalahan hukum yang terencana, responsif, dan akuntabel.

3. Tindakan yang telah dilakukan

Dalam rangka mendukung penyelesaian perkara secara efektif dan akuntabel, telah dilakukan berbagai upaya antara lain

- 1) menghadiri agenda persidangan secara efektif dan efisien
- 2) Berperan aktif dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara melalui aplikasi e-Court.
- 3) Menyusun jawaban atas gugatan secara cermat dan komprehensif dengan mendasarkan pada analisis hukum serta fakta-fakta yang relevan.
- 4) Koordinasi dengan penanganan perkara pada Biro Advokasi dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat terkait strategi penanganan perkara
- 5) Berkonsultasi dan melakukan perbantuan penanganan perkara bersama Kanwil DJKN RSK serta unit terdekat dengan Pengadilan setempat guna efektivitas penugasan
- 6) koordinasi dengan fungsional pelelang terkait atas gugatan seputar lelang

7b-N. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

1. Deskripsi Kinerja

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban

yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik.

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

$$\text{Capaian IKU} = 50\% (\text{Capaian Indeks Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik}) + 50\% (\text{Capaian Ketepatan waktu penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Publik pada Website})$$

3. Analisis Kinerja

Realisasi IKU PPID KPKNL Pekanbaru pada tahun 2025 adalah 147,50%. Target IKU dimaksud di tahun 2025 adalah sebesar 80, sehingga capaian di tahun 2025 adalah 120%. Detil capaian IKU ini dapat dilihat sebagai berikut:

KPKNL Pekanbaru	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N. Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	118	116	116	116	116	116	100	
Capaian	147,5%	145%	145%	145%	145%	145%	145%	

Tabel 21 Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Target IKU yang ditetapkan sebesar 80, sementara realisasi kinerja mencapai 116, sehingga indeks capaian kinerja tercatat sebesar 145%. Capaian ini menegaskan bahwa pengelolaan layanan informasi publik di KPKNL Pekanbaru telah dilaksanakan secara efektif, optimal, dan konsisten sepanjang tahun.

Secara periodik, realisasi IKU PPID menunjukkan kinerja yang stabil dan terjaga pada setiap periode penilaian. Pada Triwulan I, realisasi kinerja telah mencapai angka 118, yang jauh melampaui target. Kinerja tersebut dapat dipertahankan pada Triwulan II dengan realisasi sebesar 116, dan tetap konsisten hingga akhir tahun, mencerminkan keberlanjutan kualitas layanan informasi publik yang diberikan.

4. Tindakan yang telah dilakukan

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan KPKNL Pekanbaru terkait pencapaian IKU ini meliputi:

- 1) Memberikan tanggapan/jawaban sebelum batas norma waktu yang ditentukan
- 2) Menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksana PPID Tk. II (Kanwil) sesuai dengan norma waktu yang ditentukan
- 3) Menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada *website* KPKNL Pekanbaru
- 4) Peningkatan Efektivitas Koordinasi Internal dan Tata Kelola Akses Dokumen

Fisik

- 5) Pelatihan teknik komunikasi persuasif dan manajemen penanganan keluhan (*complaint handling*) melalui pelatihan *service excellent*.

8. Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

KPKNL Pekanbaru menetapkan 2 (dua) IKU untuk mengukur keberhasilan atas SS pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif, antara lain:

8a-N. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

1. Deskripsi Kinerja

IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

2. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut:

$$(Indeks\ Kualitas\ Manajemen\ Kinerja\ Organisasi\ X\ 30\%) + (Indeks\ Kualitas\ Manajemen\ Kinerja\ Pegawai\ X\ 30\%) + (Indeks\ Kualitas\ Manajemen\ Risiko\ X\ 40\%)$$

3. Analisis Kinerja

Target IKU IKMR di tahun 2025 adalah sebesar 80. Realisasi KPKNL Pekanbaru di tahun 2025 yaitu 99,88%, sehingga capaian yang diperoleh KPKNL Pekanbaru adalah 120%. Secara rinci, capaian atas IKU IKMR dapat dilihat pada:

KPKNL Pekanbaru	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N. Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/TLK
Realisasi	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	99,88	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 22 Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

Realisasi IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Target IKU sebesar 80 berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 99,88, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120%. Capaian ini mencerminkan bahwa pengawasan dan pengendalian internal, serta penerapan manajemen risiko, telah dilaksanakan secara optimal dan efektif.

Secara periodik, realisasi IKU ini menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik sepanjang tahun. Pada Triwulan I, realisasi telah mencapai 99,88, jauh melampaui target yang ditetapkan. Kinerja tersebut dapat dipertahankan pada Triwulan II dan Semester I dengan realisasi yang sama, menunjukkan stabilitas dalam penerapan sistem manajemen kinerja dan risiko di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

Memasuki Triwulan III, realisasi IKU tetap berada pada angka 99,88, baik pada penilaian Triwulan III maupun kumulatif sampai dengan akhir tahun yang tetap mencatat realisasi sebesar 99,88 dengan capaian kinerja 120%. Hal ini menandakan bahwa penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko telah terintegrasi secara berkelanjutan dalam proses kerja organisasi.

Secara keseluruhan, capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko Tahun 2025 yang mencapai 120% menegaskan komitmen KPKNL Pekanbaru dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada mitigasi risiko. Kinerja ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi serta meningkatkan keandalan pelaksanaan tugas dan

fungsi di masa mendatang.

4. Tindakan yang telah dilakukan

KPKNL Pekanbaru telah melakukan upaya sebagai berikut.

- 1) Menyusun piagam risiko untuk seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan
- 2) Melakukan evaluasi secara rutin dan terus menerus atas peta risiko yang ada di KPKNL Pekanbaru
- 3) Memastikan seluruh pegawai KPKNL Pekanbaru memenuhi kewajiban pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan mitigasi risiko dan manajemen kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 5) Meningkatkan literasi terkait risiko dan pengelolaan manajemen kinerja melalui publikasi artikel.
- 6) Melaksanakan dialog kinerja organisasi dan dialog kinerja individu secara rutin

8b-N. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

a. Deskripsi Kinerja

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00;
- 2) Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50; dan
- 3) Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah

berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun. Realisasi IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 132,52. Adapun target IKU indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM KPKNL Pekanbaru tahun 2025 adalah 100 sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar

b. Formula Pengukuran IKU

Pengukuran atas IKU dimaksud sebagai berikut.

Formula = Akumulasi realisasi kegiatan s.d. triwulan tersebut / Akumulasi jumlah rencana kegiatan rencana aksi s.d. triwulan tersebut

c. Analisis Kinerja

Realisasi IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025 adalah sebesar 113,02. Adapun target IKU indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM KPKNL Pekanbaru tahun 2025 adalah 100 sehingga capaian pada tahun 2025 adalah sebesar 113,02%. Secara rinci, capaian IKU ini pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N. Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	100	100	100	100	100	113,02	113,02	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	113,02%	113,02%	

Tabel 23 Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

Realisasi IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Target IKU sebesar 100 berhasil dicapai dengan realisasi sebesar 113,02 pada akhir tahun, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 113,02%. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat KPKNL Pekanbaru dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Zona Integritas secara konsisten dan terukur.

d. Tindakan yang telah dilakukan

Dalam mencapai IKU tersebut, KPKNL Pekanbaru telah melakukan upaya sebagai berikut.

- 1) Memastikan keberlanjutan ZI WBK/WBBM dengan menetapkan tim kerja
- 2) Menunjuk para agen perubahan sebagai katalisator dalam mewujudkan program keberlanjutan ZI WBK/WBBM dalam setiap area perubahan
- 3) Mengintegrasikan program keberlanjutan ZI WBK/WBBM dengan program pembinaan mental
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas implementasi rencana program keberlanjutan ZI WBK/WBBM
- 5) Melakukan koordinasi dan sinergi dengan stakeholder untuk menguatkan proses pembangunan integrity island
- 6) Memastikan pimpinan sebagai role model untuk terus menyampaikan pesan-pesan integritas
- 7) Melakukan sharing knowledge dengan stakeholder terkait strategi pembangunan ZI WBK/WBBM

B. REALISASI ANGGARAN DJKN TAHUN ANGGARAN 2025 PER PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2025, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2025. Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	537852 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU	PAGU REALISASI	0 0.00%	3,057,353,000 2,606,680,278 (85.26%)	617,024,000 136,306,200 (22.09%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,674,377,000 2,742,986,478 (74.65%)
		SISA	0	450,672,722	480,717,800	0	0	0	0	0	0	931,390,522
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	3,057,353,000 2,606,680,278 (85.26%)	617,024,000 136,306,200 (22.09%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	3,674,377,000 2,742,986,478 (74.65%)
		SISA	0	450,672,722	480,717,800	0	0	0	0	0	0	931,390,522

Gambar 8 Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2025

C. KINERJA LAINNYA

Selain capaian kinerja utama yang telah ditetapkan, KPKNL Pekanbaru juga melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berperan strategis dalam mendukung pencapaian IKU, penguatan kinerja organisasi, serta mendorong pengembangan sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut lahir dari berbagai inovasi baik yang berhubungan dengan pengembangan mekanisme kerja atau SOP, menciptakan bentuk sinergi dan kolaborasi baru, ataupun kombinasi lain yang menguatkan produktivitas organisasi dan individu untuk mencapai tujuan organisasi.

Sepanjang tahun 2025, berbagai inovasi ataupun program kerja yang dilakukan oleh KPKNL Pekanbaru untuk mendorong proses efisiensi dan efektivitas dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

a. Inovasi

Inovasi di lingkungan KPKNL Pekanbaru dimaknai sebagai upaya pembaruan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam proses bisnis, tata kelola, serta pola pelayanan publik. Inovasi tidak hanya terbatas pada penciptaan gagasan baru, tetapi juga mencakup penyempurnaan mekanisme kerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kolaborasi untuk menghasilkan layanan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Beberapa inovasi yang diciptakan dan dikembangkan KPKNL Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Nama Inovasi: MEDALI (Melayani Dari Aplikasi)

1.1. Deskripsi inovasi

Dalam rangka memperkuat implementasi SOP Layanan Kelompok Rentan (KEP-63/KKNL.03.03/2024) yang ditetapkan tahun 2024 dan menguatkan pelaksanaan layanan inklusif pada tahun 2025 KPKNL Pekanbaru mengembangkan Inovasi Medali (Melayani Dari Aplikasi) berdasarkan (KEP-107/KKNL.03.03/2025), yaitu layanan bagi kelompok rentan dalam bentuk:

- EMAS – (Ekstra Mobilitas Aman Sampai) digunakan untuk mengantar layanan atau antar-jemput pengguna disabilitas dan kelompok rentan.
- PERAK – (Pojok Etalase Ramah Akses) wadah promosi karya UMKM disabilitas di APT KPKNL.
- PERUNGGU – (Pengambilan Produk Tanpa Tunggu) solusi praktis tanpa turun dari kendaraan

1.2. Analisis Kinerja Inovasi

Inovasi SOP Layanan Kelompok Rentan dan inovasi layanan MEDALI (Melayani dari Aplikasi) secara tidak langsung mendukung capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N. Indeks kepuasan pengguna layanan							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/AVG
Realisasi	128.18%	127.01%	127.01%	126.88%	126.88%	126,79	126,79	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 24 IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL Pekanbaru

IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Pekanbaru menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target sepanjang tahun berjalan. Target yang ditetapkan sebesar 100 pada setiap periode pengukuran, baik triwulanan maupun tahunan, berhasil dilampaui secara konsisten.

1.3. Dampak Inovasi

Inovasi ini memberikan dampak luas, tidak hanya bagi pengguna layanan tetapi juga bagi reputasi organisasi berupa:

1) Dampak Sosial & Inklusivitas

Menghapus stigma hambatan birokrasi bagi penyandang disabilitas. KPKNL Pekanbaru berhasil menciptakan lingkungan yang *barrier-free*, sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2) Peningkatan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)

Ketersediaan layanan khusus ini berkontribusi signifikan pada peningkatan nilai IKPL KPKNL Pekanbaru, khususnya pada unsur sarana dan prasarana serta perilaku pemberi layanan.

3) Penguatan Integritas & Transparansi

Pemberian layanan terukur melalui aplikasi, dimana pemohon layanan pertama akan dilayani pertama kali lalu diikuti oleh pemohon layanan berikutnya, dan disampaikan bahwa layanan ini tidak dipungut biaya apapun. Untuk petugas layanan diberikan surat tugas non DIPA.

2. Nama Inovasi: KPKNL Pekanbaru Festival (Pekanfest)

2.1. Deskripsi

Pekanfest merupakan inovasi kegiatan unggulan KPKNL Pekanbaru yang menggabungkan edukasi, bazar UMKM, dan sosialisasi dalam satu festival terpadu. Kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru termasuk mengenalkan lelang sebagai instrumen jual beli yang aman, mudah, dan terpercaya, sekaligus memberikan panggung bagi produk-produk UMKM binaan untuk dipasarkan secara luas. Tak hanya itu, berbagai pendekatan kepada masyarakat juga dilaksanakan dalam rangka mengkampanyekan kesadaran jaga aset negara.

PekanFest 2025 merupakan *annual event* yang diselenggarakan oleh KPKNL Pekanbaru dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Negara ke-19 sekaligus Hari Oeang Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini berlangsung pada 28 Oktober s.d. 4 November 2025, dengan acara puncak dilaksanakan pada 4 November 2025 di KPKNL Pekanbaru.

Adapun rangkaian kegiatan PekanFest 2025 adalah:

1) Edukasi dan Komunikasi

No	Nama Program	Waktu	Peserta
1.	FGD Piutang Negara	29 Oktober 2025	Satuan Kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru
2.	Bimbingan Teknis Penilaian	30 Oktober 2025	Satuan Kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru
3.	Bakti Sosial	31 Oktober 2025	Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas dan Petugas Kebersihan/Supir Truk Sampah yang Kondisi Ekonominya Kurang Mampu
4.	Sosialisasi Lelang Hak Menikmati	3 November 2025	Satuan Kerja di wilayah KPKNL Pekanbaru
5.	Visit KPKNL	4 November 2025	Mahasiswa Universitas Riau
6.	Lomba Pidato tingkat SMP/MTs	4 November 2025	SMP/MTs di wilayah Kota Pekanbaru
7.	Lomba berbalas pantun tingkat SMA/SMK	4 November 2025	SMA/SMK di wilayah Kota Pekanbaru
8.	Cerdas Cermat Aset bagi <i>stakeholder</i> Pengelola BMN	4 November 2025	Satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru

Tabel 25 Edukasi dan Komunikasi PekanFest 2025

2) Pemberdayaan UMKM

No.	Nama Program	Waktu	Peserta
1.	Gebyar Lelang Produk UMKM	3 November 2025	Pelaku UMKM di Wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru dan Peserta Sosialisasi Lelang
2.	Bazaar Lelang UMKM	29 Oktober s.d. 3 November 2025	Pelaku UMKM di Wilayah Kerja KPKNL Pekanbaru

Tabel 26 Kegiatan Pemberdayaan UMKM PekanFest 2025

2.2. Analisis Kinerja

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 tercatat sebesar 110,04, yang menunjukkan kinerja organisasi berada pada kategori sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh berbagai inovasi strategis, salah satunya melalui pelaksanaan PekanFest 2025 sebagai kegiatan unggulan KPKNL Pekanbaru.

Rangkaian agenda PekanFest seperti FGD Piutang Negara, Bimbingan Teknis Penilaian, Sosialisasi Lelang Hak Menikmati, serta Visit KPKNL oleh mahasiswa Universitas Riau berkontribusi pada peningkatan pemahaman stakeholder dan masyarakat terhadap tugas dan fungsi KPKNL. Hal ini memperkuat persepsi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya, yang tercermin dari capaian sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* yang mencapai indeks di atas 100.

Selain itu, kegiatan Gebyar Lelang Produk UMKM dalam PekanFest turut mendorong kinerja pada indikator Persentase Produktivitas Lelang dan Realisasi Pokok Lelang, sekaligus memperluas pemanfaatan lelang sebagai instrumen jual beli yang aman dan terpercaya.

2.3. Dampak

Penyelenggaraan Pekanfest memberikan dampak berupa:

1) Mendorong Nilai Kinerja Organisasi

Melalui integrasi berbagai program layanan, edukasi publik, penguatan integritas, dan engagement stakeholder dalam satu rangkaian kegiatan, PekanFest mampu meningkatkan persepsi positif masyarakat, memperkuat kolaborasi lintas mitra, serta mendukung capaian indikator kinerja pada berbagai perspektif, khususnya customer perspective dan penguatan budaya integritas. Sinergi tersebut berkontribusi langsung pada peningkatan kepercayaan publik, kualitas pelayanan, serta efektivitas komunikasi organisasi yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi capaian kinerja secara keseluruhan.

2) Stimulan Ekonomi Lokal

Memberikan akses pasar baru bagi pelaku UMKM di Pekanbaru melalui mekanisme lelang maupun menjual produknya sebagai pilihan untuk kudapan rapat instansi. yang kompetitif, sehingga meningkatkan nilai jual produk lokal.

3) Mitigasi Risiko Penipuan

Dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah menurunnya laporan pengaduan terkait penipuan lelang, karena masyarakat telah mendapatkan edukasi langsung mengenai kanal resmi lelang DJKN.

4) *Branding* Institusi

Memperkuat posisi KPKNL Pekanbaru sebagai instansi yang modern, adaptif, dan dekat dengan masyarakat Riau.

3. Nama Inovasi: Learning While Working (LWW)

3.1. Deskripsi

LWW merupakan program pengembangan kompetensi SDM yang dirancang khusus bagi para pengelola keuangan daerah serta petugas pada pengawasan internal. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk mendorong perwujudan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, profesional, dan akuntabel. Ruang lingkup kolaborasi ini mencakup penguatan kompetensi teknis di bidang pengelolaan aset daerah, penilaian, dan penyelesaian piutang daerah. Program ini dilaksanakan melalui metodologi pembelajaran komprehensif yang terdiri dari 10% *strucutred learning* yang diperoleh peserta melalui KLC, 20% *learning from others* melalui *coaching and mentoring* yang diberikan oleh coach dan mentor terkait, dan 70% *learning while working* melalui penugasan langsung.

3.2. Analisis Kinerja

Kegiatan LWW menjadi katalisator dalam pencapaian IKU Tingkat kualitas layanan penilaian yang dilaksanakan melalui kolaborasi antara KPKNL Pekanbaru dan Pemerintah Daerah dan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kemandirian teknis pemerintah daerah, khususnya dalam penguasaan keahlian penilaian.

Dengan meningkatnya kompetensi pengelola aset daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, implementasi pengelolaan BMD dapat dilakukan secara optimal dalam proses pemindahtanganan BMD melalui mekanisme penjualan secara lelang, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PNBP sebagaimana tabel berikut:

PNBP PN	Rp 24.200.000	Rp 112.656.373	465.52%
PNBP Lelang	Rp 11.380.000.000	Rp 9.114.995.138	80.10%
Total	Rp 29.271.343.461	Rp 28.127.782.801	96.09%

3.3. Dampak

Penyelenggaraan LWW ini memberikan dampak berupa:

- 1) Mendorong kemandirian teknis aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah.
- 2) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara KPKNL Pekanbaru dan Pemerintah Daerah, yang mempermudah koordinasi operasional jangka panjang di masa mendatang
- 3) Mendorong terciptanya tata kelola aset dan keuangan daerah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel
- 4) Meningkatkan pemahaman teknis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penilaian/penaksiran aset, serta pengelolaan piutang daerah
- 5) Mengakselerasi proses pengurusan piutang daerah dalam rangka mendukung akuntabilitas penyusunan LKPD
- 6) Meningkatkan PAD melalui pemindahtanganan BMD melalui penjualan lelang

4. Nama Inovasi: Pekanpedia (inovasi)

4.1. Deskripsi

Majalah Pekanpedia merupakan inovasi dalam bentuk majalah digital yang menjadi media informasi dan publikasi resmi yang diterbitkan oleh KPKNL Pekanbaru sebagai sarana komunikasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Penerbitan Pekanpedia bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, memperkuat citra institusi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi, dan kinerja KPKNL Pekanbaru.

Dalam rangka membangun budaya learning organization di lingkungan KPKNL Pekanbaru dan sebagai salah satu upaya memperluas media komunikasi dan publikasi informasi, KPKNL Pekanbaru menginisiasi sarana publikasi melalui media digital berupa majalah elektronik/e-Magazine yang diberi nama "Pekanpedia" KPKNL Pekanbaru.

Dalam penyusunan Pekanpedia, dibentuk tim redaksi yang mewakili masing-masing sub/seksi/jabatan fungsional KPKNL Pekanbaru. Penunjukan tim redaksi dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas literasi pejabat/pegawai di lingkungan KPKNL Pekanbaru. Tim redaksi bertugas menyelesaikan penyusunan Pekanpedia yang pada periode tahun 2025 telah terbit sebanyak dua kali dengan tajuk “BMN Hulu Migas Untuk Negeri” dan “Penilai DJKN, Mitra Strategis Optimalisasi Aset”.

Melalui Pekanpedia, KPKNL Pekanbaru menyajikan informasi terkait capaian kinerja, inovasi layanan, kegiatan strategis, kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang, serta berbagai praktik baik yang dilaksanakan sepanjang periode pelaporan. Konten disusun secara informatif, akuntabel, dan berimbang, sehingga dapat menjadi media edukasi sekaligus referensi bagi para pemangku kepentingan. Pekanpedia diterbitkan dan dapat diakses dalam format digital, sehingga mendukung keterbukaan informasi publik yang lebih luas, efisien, dan berkelanjutan.

4.2. Analisis Kinerja

Majalah digital Pekanpedia menjadi katalisator dalam pencapaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi yang disajikan pada tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/AVG
Realisasi	98,95	87,43	87,43	87,77	87,77	87,51	87,51	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tabel 28 Tabel Capaian Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Penerbitan Majalah Pekanpedia, mendukung pencapaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi. Hal ini karena efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dari tingkat keberhasilan peserta atau pemangku kepentingan dalam memahami substansi dan materi yang disampaikan melalui berbagai kegiatan edukasi, termasuk pelatihan dan sosialisasi, yang dalam hal ini diperkuat melalui media informasi Majalah Pekanpedia. Pekanpedia

mendorong budaya belajar kolektif, meningkatkan literasi kebijakan, serta memperkuat kapasitas SDM secara berkesinambungan. Dari sisi kinerja organisasi, keberadaan Pekanpedia turut berkontribusi terhadap pencapaian IKU 3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi. Pada Tahun 2025, indikator ini menunjukkan realisasi sebesar 87,51 dari target 80, dengan capaian kinerja mencapai 120%.

4.3. Dampak

Penerbitan majalah digital Pekanpedia memberikan dampak berupa:

1) Implementasi *Learning Organizaion*

Penerbitan Majalah Digital Pekanpedia berdampak positif terhadap penguatan budaya *learning organization* di lingkungan KPKNL Pekanbaru melalui penyediaan media pembelajaran dan komunikasi yang terintegrasi.

2) Penguatan Kinerja Organisasi

Penerbitan Majalah Pekanpedia berkontribusi terhadap penguatan kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas komunikasi internal dan eksternal KPKNL Pekanbaru.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari aspek pengembangan SDM, Pekanpedia menjadi media pembelajaran dan berbagi pengetahuan bagi pegawai melalui penyajian artikel tematik dan dokumentasi kegiatan organisasi. Keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan dan penerbitan majalah mendorong peningkatan kompetensi di bidang literasi informasi, komunikasi, dan pengelolaan konten, serta menumbuhkan budaya belajar, kolaborasi, dan inovasi di lingkungan KPKNL Pekanbaru.

5. Nama Inovasi: Semarak Melaju

5.1. Deskripsi

Semarak Melaju menjadi inovasi strategis dari KPKNL Pekanbaru yang dirancang untuk mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Riau agar mampu "naik kelas". Program ini mengintegrasikan perbaikan tata kelola proses bisnis dengan digitalisasi informasi untuk mengoptimalkan penjualan produk UMKM melalui platform lelang resmi. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas tantangan kapasitas SDM pelaku

usaha yang belum merata serta belum adanya program kolaboratif antar-instansi pembina UMKM yang terintegrasi secara komprehensif.

5.2. Analisis Kinerja

Kegiatan Semarak Melaju menjadi katalisator dalam pencapaian IKU Persentase produktivitas lelang yang disajikan pada tabel berikut.

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP. Persentase produktivitas lelang							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	52,65%	65,72%	65,72%	75,59%	75,59%	85,09%	85,09%	
Capaian	112,27%	114,43%	114,43%	114,17%	114,17%	113,59%	162,27%	

Tabel 29 Tabel Capaian Persentase Produktivitas Lelang

Kegiatan Semarak Melaju, memberikan kontribusi terhadap pencapaian IKU Persentase Produktivitas Lelang. Melalui penyelenggaraan lelang yang melibatkan pelaku UMKM, kegiatan ini mendorong peningkatan jumlah risalah lelang dalam satu tahun, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas lelang secara keseluruhan.

5.3. Dampak

Penyelenggaraan Semarak Melaju memberikan dampak berupa:

- 1) Mendorong Kinerja UMKM
Meningkatkan produktivitas penjualan produk lokal dengan mengoptimalkan platform lelang.go.id dan etalase khusus UMKM pada area pelayanan terpadu (APT).
- 2) Memasyarakatkan Lelang Sukarela
Mengenalkan lelang sebagai instrumen jual-beli yang aman dan efektif kepada khalayak luas.

6. Nama Inovasi: Pekan Informasi dan Layanan On The Streets (PILOTS)

6.1. Deskripsi

Program PILOTS (Pekan Informasi dan Layanan *On The Streets*) merupakan inovasi layanan KPKNL Pekanbaru untuk melaksanakan fleksibilitas layanan dan upaya edukasi tugas dan fungsi kepada masyarakat secara langsung di ruang publik. Program ini dirancang untuk

meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi KPKNL, khususnya di bidang lelang, pengelolaan kekayaan negara, serta layanan publik lainnya, melalui pendekatan yang komunikatif, partisipatif, dan mudah dipahami.

PILOTS memanfaatkan momentum kegiatan masyarakat, seperti *Car Free Day*, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Kegiatan dalam program ini meliputi penyampaian informasi layanan, konsultasi layanan, edukasi publik, dialog interaktif, simulasi lelang, sosialisasi layanan inklusif dan berintegritas, serta kampanye kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan pengamanan aset negara.

6.2. Analisis Kinerja

Indikator kinerja Indeks PILOTS pada KPKNL Pekanbaru tahun 2025 dapat disampaikan sebagaimana pada tabel berikut.

Persentase	Target	Realisasi	Capaian
Pelaksanaan PILOTS KPKNL Pekanbaru Tahun 2025	70	100	142% (120%)

Tabel 30 Tabel Realisasi Capaian Pelaksanaan PILOTS KPKNL Pekanbaru

Kegiatan PILOTS KPKNL Pekanbaru Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Target partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sebesar 70 persen berhasil direalisasikan hingga mencapai 100%. Dengan capaian tersebut, tingkat pencapaian kinerja tercatat sebesar 142% dari target awal, atau dikonversi sebesar 120%.

Customer Perspective (20%)										
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-								99.58
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	110.00%	19.00%	36.54%	110.00	110.00	40.19
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	85.08%	19.00%	36.54%	85.08	85.08	31.09
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	105.09%	14.00%	26.92%	105.09	105.09	28.29
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-								120.00
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	100.00	126.79	14.00%	50.00%	126.79	120.00	60.00
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	90.42	14.00%	50.00%	122.18	120.00	60.00

Tabel 31 Customer Perspective KPKNL Pekanbaru

Pada Tahun 2025, *Customer Perspective* KPKNL Pekanbaru menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, tercermin dari optimalnya pengelolaan kekayaan negara dan lelang serta meningkatnya kualitas pelayanan yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai kegiatan pendukung, salah satunya melalui pelaksanaan PILOTS (Pekan Informasi Layanan On The Spots) yang berperan strategis sebagai media edukasi, komunikasi, dan layanan langsung kepada pemangku kepentingan.

Selanjutnya, pada aspek pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa, capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan dan Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi menunjukkan hasil yang sangat tinggi dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan KPKNL Pekanbaru dalam memberikan layanan yang responsif, informatif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. PILOTS menjadi salah satu faktor pendukung utama karena menghadirkan layanan yang bersifat proaktif, interaktif, dan mudah diakses, sehingga meningkatkan kualitas komunikasi, memperkuat pemahaman pengguna jasa, serta membangun kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan PILOTS Tahun 2025 yang terintegrasi dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan *Integrity Week*, yang merupakan agenda rutin dalam rangkaian kegiatan PILOTS. Rangkaian tersebut kemudian mendukung pencapaian IKU Indeks Integritas.

Pelaksanaan Program PILOTS menunjukkan kinerja yang positif dan selaras dengan tujuan peningkatan kualitas layanan publik dan komunikasi kelembagaan. Program ini berhasil mengubah pola layanan yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih proaktif dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Dari sisi pelaksanaan, program ini:

- Meningkatkan intensitas interaksi langsung antara KPKNL Pekanbaru dan masyarakat;
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam dialog dan konsultasi layanan;
- Menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kebijakan dan layanan secara sederhana dan kontekstual.

Selain itu, PILOTS juga berfungsi sebagai media penguatan citra institusi yang transparan, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan. Keterlibatan pegawai secara langsung dalam kegiatan ini turut meningkatkan kompetensi komunikasi publik dan pemahaman pegawai terhadap ekspektasi masyarakat terhadap layanan KPKNL.

6.3. Dampak

Program PILOTS memberikan dampak yang nyata baik bagi masyarakat maupun organisasi.

Bagi masyarakat, program ini:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan literasi terkait layanan lelang dan pengelolaan kekayaan negara;
- 2) Mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat;
- 3) Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan KPKNL Pekanbaru.

Bagi organisasi, PILOTS:

- 1) Memperkuat peran KPKNL Pekanbaru sebagai institusi pelayanan publik yang adaptif dan inovatif;
- 2) Mendukung pencapaian target kinerja melalui peningkatan kesadaran dan pemanfaatan layanan;
- 3) Menjadi strategi efektif dalam membangun *stakeholder engagement* yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program PILOTS tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen KPKNL Pekanbaru dalam menghadirkan layanan publik yang fleksibel bagi masyarakat, karena pengguna layanan tidak harus berkunjung ke area pelayanan KPKNL Pekanbaru dan dapat memanfaatkan hari libur untuk mengakses layanan publik.

b. Program Sinergi

1. Nama Program: Kekayaan Negara (KN) Award

1.1. Deskripsi

KN Award merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh KPKNL Pekanbaru kepada Satker dan pemangku kepentingan lainnya atas kontribusi luar biasa

dalam pengelolaan BMN maupun BMD, pengurusan piutang negara, serta partisipasi aktif dalam pelaksanaan lelang.

Pada tahun 2025, penyelenggaraan KN Award mengusung tema "Sinergi Mengelola Aset, Mewujudkan Nilai Manfaat yang Akuntabel". Kegiatan ini bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan yang diselenggarakan secara tahunan, melainkan menjadi forum strategis untuk memperlancar komunikasi antara KPKNL Pekanbaru dengan para pengguna layanan. Kategori penghargaan yang diberikan mencakup sebagaimana tabel berikut:

KELOMPOK 1 (Kategori kurang dari 5000 NUP)			
No.	Kategori	Stakeholder	Peringkat
1	Produktivitas BMN Terbaik	LPP RRI Pekanbaru	1
		TVRI Stasiun Riau	2
		Kejaksaan Tinggi Riau	3
2	Penatausahaan BMN Terbaik	KPU Kab. Rokan Hulu	1
		Stasiun KIPM Pekanbaru	2
		Pengadilan Agama Teluk Kuantan	3
3	Pengamanan BMN Terbaik	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	1
		Pengadilan Tinggi Pekanbaru	2
		Perwakilan BPKP Provinsi Riau	3
KELOMPOK 2 (Kategori di atas 5000 NUP)			
1	Produktivitas BMN Terbaik	Polres Indragiri Hulu	1
		Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	2
		UIN SUSKA Riau	3
2	Penatausahaan BMN Terbaik	MAN 2 KOTA PEKANBARU	1
		BPMP Provinsi Riau	2
		MTSN 1 Kota Pekanbaru	3
3	Pengamanan BMN Terbaik	Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar	1
		Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau	2
		Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	3

Operator BMN			
1	Operator BMN Terbaik	Julindra Aidi (Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau)	1
Pensertipikatan BMN			
1	Kinerja Pensertipikatan BMN Terbaik	Kantor Pertahanan Kota Pekanbaru	1
		Kantor Pertahanan Kab. Pelalawan	2
		Kantor Pertahanan Kab. Indragiri Hilir	3
PIUTANG			
1	Akselerasi dan Tindak Lanjut Pengurusan Piutang Negara/Daerah Terbaik	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	1
		Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi & Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)	2
LELANG			
1	PNBP Lelang Tertinggi Lingkup Perbankan	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
2	PNBP Lelang Tertinggi Lingkup Perbankan	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	1
3	PNBP Lelang Tertinggi Lingkup Kementerian/Lembaga	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru	1
4	PNBP Lelang Tertinggi Lingkup Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu (BPKAD Rohul)	1
5	Tertib Administrasi Lingkup Perbankan	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Rengat	1
		PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Area Pekanbaru	2
		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery Region 02	3
6	Tertib Administrasi Lingkup Kementerian/Lembaga	KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	1

		Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir	2
		Polres Indragiri Hulu	3
7	Tertib Administrasi Lingkup Pemerintah Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	1
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar	2
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	3
PENILAIAN			
1	Kualitas Permohonan Penilaian BMD dan Tindak Lanjut Terbaik	Pemda Kabupaten Pelalawan	1
2	Penilai Pemerintah Non DJKN Terbaik	Kejaksaan Tinggi Riau	1

Tabel 32 Penerima Apresiasi Stakeholder KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

1.2. Analisis Kinerja

Kegiatan KN Award menjadi katalisator dalam pencapaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN yang disajikan pada tabel berikut.

Penerapan tata kelola aset yang efektif			
4b-CP. Persentase evaluasi kinerja BMN			
Komponen	Target	Realisasi	Capaian
Aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya	397	400	100.76%
Rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker	20	30	120%
Total			110.38%

Tabel 33 Realisasi IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

Realisasi IKU Presentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN memiliki indeks capaian 110,38% dengan realisasi 400 dari 397 target yang ditetapkan. Komponen IKU portofolio aset terdiri dari evaluasi kinerja BMN dan Penyusunan dan Pencapaian Rekomendasi BMN. Lebih lanjut, kegiatan KN Awards juga mendukung dalam pencapaian IKU Produktivitas Lelang sebagai berikut:

KPKNL Pekanbaru	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP. Persentase produktivitas lelang							
	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	52,65%	65,72%	65,72%	75,59%	75,59%	85,09%	85,09%	
Capaian	112,27%	114,43%	114,43%	114,17%	114,17%	113,59%	162,27%	

Tabel 34 Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

Melalui mekanisme apresiasi kepada *stakeholder* lelang, kegiatan ini mendorong peningkatan motivasi, kepercayaan, dan komitmen penjual dalam memanfaatkan layanan lelang secara berkelanjutan. Dampak tersebut tercermin pada peningkatan frekuensi pelaksanaan lelang, nilai pokok lelang, serta rasio lelang laku.

1.3. Dampak

Penyelenggaraan KN Award memberikan dampak berupa:

- 1) Memperkuat *stakeholder intimacy* melalui pemberian apresiasi yang terstruktur dan bermakna kepada para pemangku kepentingan
- 2) Penguatan Kinerja Organisasi
Meningkatkan citra KPKNL Pekanbaru sebagai instansi yang kolaboratif dan transparan. Hal ini mempermudah pencapaian target-target krusial karena adanya kesamaan visi dengan Satker.
- 3) Dukungan terhadap IKU
KN Award menjadi pendorong bagi capaian IKU, khususnya pada IKU Persentase evaluasi kinerja BMN. Dengan adanya kompetisi yang sehat antar-Satker, standar pengelolaan aset pada satker di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru meningkat secara kolektif.
- 4) Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bagi internal pegawai KPKNL Pekanbaru, pengelolaan acara berskala besar ini mengasah kemampuan *soft skill* dalam hal *stakeholder management*, kepemimpinan, dan manajemen proyek (*Event Organizer* internal), yang krusial bagi pengembangan kompetensi manajerial pegawai.

2. Nama Program: Implementasi Eco Office

2.1. Deskripsi

Selain pelaksanaan tugas dan fungsi utama, KPKNL Pekanbaru juga secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan penunjang kinerja yang berdampak positif terhadap efektivitas organisasi. Salah satu kegiatan strategis tersebut adalah implementasi Program *Eco Office* sebagai wujud komitmen terhadap pengelolaan lingkungan kerja yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, KPKNL Pekanbaru menerapkan prinsip-prinsip kantor ramah lingkungan secara menyeluruh, meliputi pengelolaan sampah, pengurangan penggunaan plastik dan kertas, penghematan energi listrik dan air salah satunya adalah penggunaan solar panel pada beberapa titik penerangan di kantor serta penggunaan lampu yang menggunakan sensor gerak, penataan ruang kerja yang nyaman, serta pengendalian kualitas lingkungan kerja. Implementasi ini tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga membentuk budaya kerja yang disiplin, peduli lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

2.2. Analisis Kinerja

Implementasi program *Eco Office* pada KPKNL Pekanbaru sepanjang tahun 2025 menunjukkan komitmen organisasi yang kuat terhadap efisiensi anggaran negara dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan data operasional pada semester I dan II tahun 2025, efektivitas program ini diukur melalui parameter konsumsi listrik dan air sebagai berikut:

**LAPORAN PENGHEMATAN ENERGI
SEMESTER I TAHUN 2025**

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Unit Eselon II : Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau unit Eselon
III : KPKNL Pekanbaru

A	LISTRIK	VOLUME	TOTAL BIAYA
	Bulan Januari 2025	10.160 Kwh	Rp17.780.089,00
	Bulan Februari 2025	7.511 Kwh	Rp13.143.771,00
	Bulan Maret 2025	9.090 Kwh	Rp15.907.207,00
	Bulan April 2025	9.334 Kwh	Rp16.333.788,00
	Bulan Mei 2025	7.669 Kwh	Rp13.420.794,00
	Bulan Juni 2025	9.868 Kwh	Rp17.268.530,00
	Jumlah Total	53.631 Kwh	Rp93.854.179,00
	Rata-Rata Semester I Tahun 2025	8.938 Kwh	Rp15.642.363,17
	Rata-Rata Semester II Tahun 2024	9.080 Kwh	Rp15.890.313,00
	Kenaikan/Penurunan	-142 Kwh	-Rp247.949,83
	Persentase Kenaikan/Penurunan	-2%	-2%

Tabel 35 Penghematan Energi KPKNL Pekanbaru Semester I Tahun 2025

**LAPORAN PENGHEMATAN ENERGI
SEMESTER II TAHUN 2025**

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Unit Eselon II : Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
Unit Eselon III : KPKNL Pekanbaru

A	LISTRIK	VOLUME	TOTAL BIAYA
	Bulan Juli 2025	10.218 Kwh	Rp17.882.060,00
	Bulan Agustus 2025	11.980 Kwh	Rp20.965.008,00
	Bulan September 2025	10.210 Kwh	Rp17.866.764,00
	Bulan Oktober 2025	9.891 Kwh	Rp17.309.319,00
	Bulan November 2025	12.370 Kwh	Rp21.648.219,00
	Bulan Desember 2025	9.938 Kwh	Rp17.390.896,00
	Jumlah Total	64.607 Kwh	Rp113.062.266,00
	Rata-Rata Semester II Tahun 2025	10.768 Kwh	Rp18.843.711,00
	Rata-Rata Semester I Tahun 2025	8.938 Kwh	Rp15.642.363,17
	Kenaikan/Penurunan	1.829 Kwh	Rp3.201.347,83
	Persentase Kenaikan/Penurunan	20%	20%

Tabel 36 Penghematan Energi KPKNL Pekanbaru Semester II Tahun 2025

Kinerja Semester I: Realisasi penggunaan listrik mencapai total 53.631 Kwh dengan biaya sebesar Rp93.854.179,00. Capaian ini menunjukkan efisiensi nyata melalui penurunan volume sebesar 2% atau setara 142 Kwh jika dibandingkan dengan Semester II Tahun 2024.

Kinerja Semester II: Realisasi penggunaan listrik pada periode ini tercatat sebesar 64.607 Kwh dengan total biaya Rp113.062.266,00. Terdapat kenaikan volume sebesar 1.829 Kwh atau 20% dibandingkan rata-rata Semester I Tahun 2025.

Analisis Penyebab: Peningkatan volume penggunaan listrik pada Semester II merupakan dampak positif dari transisi energi melalui ketersediaan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi operasional. Kebijakan ini menyebabkan pergeseran beban energi ke tenaga listrik. Meskipun meningkatkan serapan daya, langkah ini merupakan strategi nyata dalam mendukung program *Eco Office* untuk menekan emisi gas buang secara berkelanjutan.

2.3. Dampak

Implementasi *Eco Office* memberikan dampak yang luas, baik secara internal maupun eksternal:

- 1) Dukungan Terhadap Target Nasional
Berkontribusi dalam upaya pemerintah menurunkan emisi karbon dan mendukung kebijakan *Green Economy*.
- 2) Peningkatan Produktivitas
Lingkungan kantor yang bersih dan asri menciptakan atmosfer kerja yang lebih nyaman dan meminimalisir tingkat stres pegawai.
- 3) Penguatan Budaya Ramah Lingkungan
Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia terhadap implementasi *eco office*.

3. Nama Program: Pembinaan Mental

3.1. Deskripsi

a. Pembinaan Mental Rohani Kegiatan kerohanian (Islam dan Kristen)

Kegiatan kerohanian (Islam dan Kristen) seperti peringatan hari besar agama, komunitas tilawah, *One Day One Hadits* (ODOH), sholat berjamaah, Ramadhan Kareem (Lomba foto ramadhan, Podcast Berbuka Puasa, Berbagi Takjil), dan kegiatan sosial KPKNL Peduli berperan dalam membangun pegawai yang beriman, berakhlak, dan berintegritas. Nilai-nilai spiritual ini menjadi benteng moral dalam pelaksanaan tugas dan pemberian layanan.

b. Pembinaan Mental Ideologi

Kegiatan ini diselenggarakan melalui Apel Senin BerAKHLAK, Doa dan Pesan Inspirasi Pagi (DOPING), Bangga Berbaju Nusantara (BABATUR), Pesan integritas (PESITAS), memperkuat rasa nasionalisme, kedisiplinan, serta kesadaran kolektif akan peran pegawai sebagai penjaga keuangan dan aset negara. Kegiatan menonton film pahlawan “Kartini” dan “HOS Cokro Aminoto” merupakan salah satu upaya meningkatkan rasa nasionalisme. Pelatihan baris berbaris digelar dalam rangka *in house training* kesadaran bela negara dan peningkatan kerja sama antar pegawai. Aspek ini menjadi pengungkit penting dalam menjaga konsistensi perilaku berintegritas pasca-WBBM.

c. Pembinaan Mental Kompetensi

Pembinaan Mental Kompetensi bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepemimpinan melalui Program AMPERA (berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia), Jumat Bertutur (MATUR), Pekan Informasi dan Layanan On The Street (PILOTS), Forum Literasi Punggawa Aset (FLPA), serta pemberdayaan komunitas, penguatan kompetensi mendorong peningkatan profesionalisme pegawai secara berkelanjutan. *Coaching* dan *mentoring* terkait peningkatan kompetensi rutin digelar selama satu bulan sekali dalam Dialog Kinerja Individu dan optimalisasi komunitas pemberdayaan perempuan GAPURA (Gabungan Perempuan Berdaya). Kegiatan ini menjadi jembatan antara budaya kerja unggul dan pencapaian kinerja organisasi.

d. Pembinaan Mental Kejiwaan

Kegiatan ini bertujuan membentuk sumber daya manusia yang memiliki kesehatan dan ketahanan fisik dan mental yang optimal melalui pendekatan aspek kejiwaan (psikologi) diwujudkan dalam program Webinar Peringatan Hari Kesehatan Mental Dunia dalam rangka sosialisasi layanan konseling Kemenkeu, psikoedukasi, podcast kesehatan mental, pembiasaan pola hidup sehat melalui Jumat Krida, Sesi Inspirasi Senin Sore (SISENSOR), bakti sosial bersama para penyandang disabilitas dan kelompok rentan, serta komunitas hobi. KPKNL Pekanbaru menjaga kesehatan mental pegawai agar tetap produktif, adaptif, dan resilien. Lingkungan kerja yang sehat secara psikologis diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas kinerja dan kualitas layanan.

3.2. Analisis Kinerja

Indeks pelaksanaan program pembinaan mental pada KPKNL Pekanbaru 2025	Target	Realisasi	Capaian
	3,25	4	123,07%

Tabel 37 Capaian Implementasi Program Bintang KPKNL Pekanbaru Tahun 2025

Indikator kinerja Indeks Pelaksanaan Program Pembinaan Mental pada KPKNL Pekanbaru menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dan melampaui target secara signifikan pada tahun 2025. Target yang ditetapkan sebesar 3,25 berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai angka 4.

Capaian yang menyentuh angka 123,07% ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam menyelenggarakan seluruh pilar pembinaan mental secara komprehensif, mulai dari aspek ideologi, rohani, kejiwaan, hingga kompetensi. Pelampauan target yang konsisten ini didorong oleh integrasi berbagai kegiatan kebintalan dengan program kerja agen perubahan dan rencana kerja tim pengungkit keberlanjutan WBBM.

3.3. Dampak

a. Pembinaan Mental Rohani Kegiatan kerohanian (Islam dan Kristen)

Rangkaian kegiatan pembinaan mental ini memberikan dampak fundamental bagi keberlangsungan organisasi berupa:

1) Penyediaan Benteng Moral

Nilai-nilai spiritual yang ditanamkan menjadi "polisi internal" dalam diri setiap pegawai, sehingga menjadi benteng moral yang kuat dalam menghadapi godaan gratifikasi atau penyimpangan dalam pemberian layanan publik.

2) Humanisme dalam Layanan

Pegawai yang memiliki kematangan rohani cenderung memberikan pelayanan dengan empati yang lebih tinggi, yang berdampak pada meningkatnya kepuasan pengguna jasa (Satker dan masyarakat).

3) Resiliensi Pegawai

Penguatan mental rohani terbukti meningkatkan daya tahan (*resilience*) dan kesehatan mental pegawai dalam menghadapi tekanan pekerjaan yang tinggi dan target IKU yang menantang.

4) KPKNL sebagai Organisasi yang Berintegritas

Secara kolektif, budaya religius ini memperkuat citra KPKNL Pekanbaru sebagai kantor yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga bersih dan berakhlak mulia.

b. Pembinaan Mental Ideologi

Rangkaian kegiatan pembinaan mental ini memberikan dampak fundamental bagi keberlangsungan organisasi berupa:

1) Pencapaian IKU

Melalui DOPING dan Apel BerAKHLAK, pegawai selalu diingatkan untuk memberikan layanan prima. Hal ini berdampak pada minimnya komplain dan meningkatnya nilai survei kepuasan pengguna layanan terhadap integritas petugas.

2) Penguatan Kinerja Organisasi

Kegiatan ini menjadi jangkar untuk menjaga keberlanjutan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembinaan mental memastikan tidak terjadi penurunan standar perilaku (*backsliding*) setelah predikat diraih.

3) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pesan Integritas dan DOPING berfungsi sebagai pengembangan *soft skill* dalam aspek etika, sehingga pegawai memiliki kecerdasan moral untuk membedakan antara tindakan yang profesional dan tindakan yang berisiko melanggar aturan.

c. Pembinaan Mental Kompetensi

Rangkaian kegiatan pembinaan mental ini memberikan dampak fundamental bagi keberlangsungan organisasi berupa:

1) Dukungan Terhadap Pencapaian IKU

Melalui pelaksanaan Program AMPERA, Jumat Bertutur (MATUR), Pekan Informasi dan Layanan On The Street (PILOTS), serta Forum Literasi Punggawa Aset (FLPA), pegawai secara berkelanjutan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman teknis, kualitas pelaksanaan pekerjaan, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian IKU,

khususnya yang berkaitan dengan layanan publik, pengelolaan aset, dan komunikasi edukatif kepada pemangku kepentingan.

2) Penguatan Kinerja Organisasi

Pembinaan mental dan kompetensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat budaya kerja unggul dan meningkatkan efektivitas organisasi. Pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* secara rutin melalui Dialog Kinerja Individu serta penguatan komunitas mendorong keselarasan antara kinerja individu dan tujuan organisasi. Dengan demikian, organisasi mampu menjaga konsistensi kinerja, meningkatkan kolaborasi lintas fungsi, serta beradaptasi terhadap dinamika tugas dan tantangan yang dihadapi.

3) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Program pembinaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan berperan penting dalam pengembangan kapasitas dan profesionalisme pegawai. Optimalisasi komunitas pemberdayaan, termasuk GAPURA (Gabungan Perempuan Berdaya), serta berbagai forum pembelajaran internal, mendorong peningkatan kompetensi teknis dan *soft skills*, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Hal ini membentuk sumber daya manusia yang adaptif, berdaya saing, dan siap mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

d. Pembinaan Mental Kejiwaan

Rangkaian kegiatan pembinaan mental ini memberikan dampak fundamental bagi keberlangsungan organisasi berupa:

1) Dukungan Terhadap IKU

Pegawai dengan kondisi mental yang stabil dan sehat mampu memberikan layanan yang lebih empati, sabar, dan solutif. Hal ini berdampak langsung pada tercapainya target Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) yang tetap berada di level tertinggi. Lebih lanjut, Ketahanan mental (*resilience*) yang diharapkan tercipta dari kegiatan ini dapat membantu pegawai tetap produktif meskipun berada di bawah tekanan target IKU yang menantang, sehingga seluruh target output organisasi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa penurunan kualitas.

2) Penguatan Kinerja Organisasi

Terciptanya budaya kerja yang saling mendukung dan terbuka, di mana setiap pegawai merasa aman secara psikologis. Hal ini menjadi fondasi penting bagi stabilitas kinerja jangka panjang KPKNL Pekanbaru.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Melalui bakti sosial dan SISENSOR, pegawai mengembangkan kecerdasan emosional dan rasa syukur, yang membentuk karakter aparatur negara yang lebih humanis, berintegritas, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

4. Nama Program: Forum Konsultasi Publik

3.1. Deskripsi

Forum Konsultasi Publik (FKP) KPKNL Pekanbaru merupakan wadah dialog, diskusi, dan pertukaran opini antara penyelenggara layanan publik dengan para pengguna layanan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaring masukan guna penyempurnaan layanan sesuai dengan visi dan misi KPKNL dalam memberikan pelayanan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan adil, termasuk layanan inklusif bagi kelompok disabilitas dan rentan. Selama tahun 2025, KPKNL Pekanbaru telah menyelenggarakan FKP sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Juni 2025 dan 23 September 2025.

3.2. Analisis Kinerja

Kegiatan FKP menjadi katalisator dalam pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) khususnya terkait *customer perspective* yang disajikan pada tabel berikut.

Customer Perspective (20%)											
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal			-							99.58
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100.00%	110.00%	19.00%	36.54%	110.00	110.00	40.19	
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100.00%	85.08%	19.00%	36.54%	85.08	85.08	31.09	
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100.00%	105.09%	14.00%	26.92%	105.09	105.09	28.29	109.79
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa			-							120.00
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	100.00	126.79	14.00%	50.00%	126.79	120.00	60.00	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74.00	90.42	14.00%	50.00%	122.18	120.00	60.00	

Tabel 38 Capaian IKU Customer Perspective

Berdasarkan capaian Customer Perspective, kinerja KPKNL Pekanbaru menunjukkan hasil yang sangat optimal dan didukung oleh pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana penyaluran kebutuhan dan ekspektasi pengguna layanan. Melalui forum ini,

masuk stakeholder dimanfaatkan untuk perbaikan proses layanan kekayaan negara dan lelang, yang berdampak pada tingginya Indeks Kepuasan Pengguna Layanan serta meningkatnya efektivitas edukasi dan komunikasi. Perbaikan kualitas layanan tersebut turut mendorong peningkatan kepercayaan dan partisipasi stakeholder dalam pemanfaatan layanan lelang, yang tercermin pada terjaganya produktivitas lelang, realisasi pokok lelang, serta optimalisasi pengelolaan aset negara. Dengan demikian, Forum Konsultasi Publik berkontribusi langsung terhadap pencapaian IKU *Customer Perspective* dan penguatan NKO.

Pada pelaksanaan FKP Tahun 2025, KPKNL Pekanbaru melakukan penguatan layanan yang inklusif bagi seluruh pengguna layanan tanpa diskriminasi serta menegaskan komitmen terhadap penyelenggaraan layanan yang berintegritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan kepuasan pengguna layanan. Selain itu, melalui kegiatan FKP, pemahaman pemangku kepentingan terhadap tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru juga semakin meningkat, sehingga mendukung efektivitas edukasi dan komunikasi organisasi.

3.3. Dampak

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola organisasi. Melalui FKP, KPKNL Pekanbaru memperoleh masukan konstruktif dari satuan kerja dan mitra kerja yang menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan serta perbaikan proses layanan secara berkelanjutan.

Selain itu, FKP berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pengguna layanan melalui penguatan prinsip layanan yang inklusif, transparan, dan berintegritas. Kegiatan ini juga mendorong peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, sehingga memperkuat efektivitas edukasi dan komunikasi. Secara keseluruhan, FKP berperan sebagai sarana strategis dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama organisasi.

D. PENGHARGAAN

No	Pemberi Penghargaan	Ruang Lingkup
1.	Pelaksana IKU Portofolio Tertinggi dan Manajemen Risiko Terbaik Tahun 2024	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
2.	Juara I Lomba Amplifikasi Konten Antikorupsi Teraktif pada DJKN <i>Integrity Week</i> 2025	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.	Apresiasi konten Instagram terbaik Semester I Tahun 2025	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
4.	Apresiasi Utilisasi CRM Deskpro Agustus 2025	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
5.	Piagam Penghargaan Sinergi Bersama Mitra Kerja Strategis	KPPBC TMP C Tembilahan Awards
6.	Penghargaan Atas Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025	KPKNL Pekanbaru

Tabel 39 Penerimaan Penghargaan Tahun 2025

BAB IV – PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Pekanbaru tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Pekanbaru dalam tahun anggaran 2025 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, kami terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan, KPKNL Pekanbaru telah mengupayakan berbagai langkah perbaikan dan inovasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Capaian yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, sementara tantangan yang dihadapi menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan strategi di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini. Ke depan, KPKNL Pekanbaru akan terus berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang lebih optimal, meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



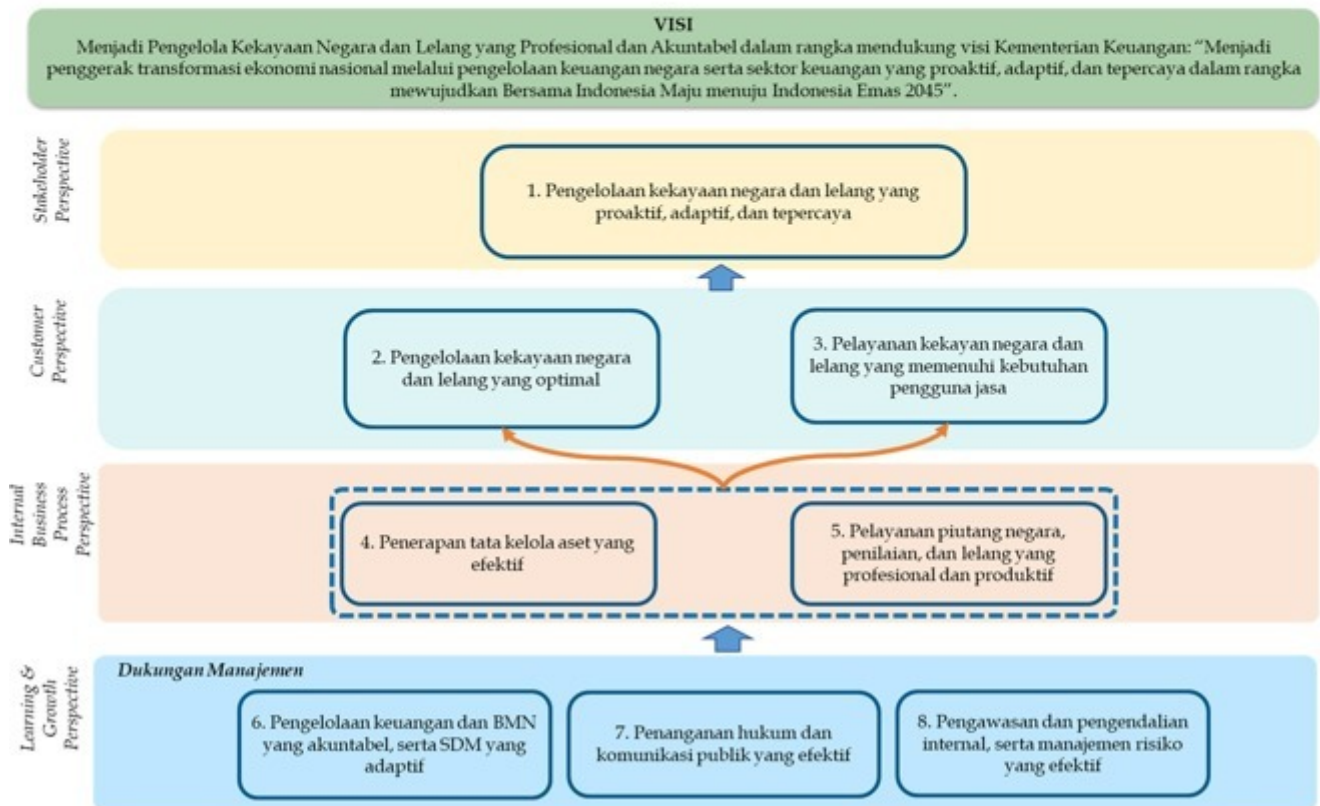
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-03/WKN.03/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp29,2 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp304,5 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,6 M)
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerpaan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
		4c-N Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100



Program/Kegiatan 2025**Anggaran**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp433,776,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp127,930,000
2. Pengelolaan Aset Rp305,846,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp3,001,171,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp58,872,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp2,758,154,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Rp171,537,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp12,608,000

Kota Pekanbaru, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat,
dan Kepulauan Riau



Ditandatangani Secara Elektronik
Wahyu Prihantoro

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Pekanbaru



Ditandatangani Secara Elektronik
Maulina Fahmilita



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp29,2 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp304,5 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,6 M)
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerpaan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4c-N	Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Pekanbaru, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Pekanbaru



Ditandatangani Secara Elektronik
Maulina Fahmilita



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Pekanbaru, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru



Ditandatangani Secara Elektronik
Maulina Fahmilita



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Maulina Fahmilita		NAMA	Wahyu Prihantoro
NIP	19710514 199803 2 002		NIP	19720417 199703 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp29,2 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp304,5 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,6 M)	Penerima Layanan
3	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4	Penerpaan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
		Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



PERILAKU KERJA		
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Pekanbaru, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wahyu Prihantoro

19720417 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Maulina Fahmilita

19710514 199803 2 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	28 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp29,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp304,5 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,6 M)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4c-N	Persentase penyelesaian inventarisasi dan penilaian BMN Hulu Migas	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80



	8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									

Kota Pekanbaru, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wahyu Prihantoro
19720417 199703 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Maulina Fahmilita
19710514 199803 2 002

